



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 69 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
KOTA DEPOK 2019-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristik yang harus segera ditanggulangi karena menyangkut harkat, martabat, dan hak asasi manusia serta dapat menghambat upaya terwujudnya kesejahteraan umum, mewujudkan visi kota Depok yang Unggul Nyaman dan Religius;
- b. bahwa dalam rangka menanggulangi Kemiskinan di Kota Depok secara terkoordinasi, terpadu, efektif dan efisien, perlu disusun Rencana Aksi Daerah penanggulangan Kemiskinan Kota Depok Tahun 2019-2023 berdasarkan Basis data terpadu (BDT) dan/atau Data Terpadu Fakir Miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kota Depok Tahun 2019-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 101 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG RENCANA AKSI PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KOTA DEPOK TAHUN 2019-2023.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Daerah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota.

6. Miskin adalah kondisi dimana seorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, Pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, sumberdaya alam, rasa aman dan partisipasi.
7. Kemiskinan adalah suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya, yang antara lain mencakup kebutuhan pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan, sehingga tidak mampu mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
8. Hak dasar adalah hak masyarakat yang harus dilindungi oleh Pemerintah Daerah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat terutama hak ekonomi, sosial dan budaya.
9. Garis Kemiskinan adalah jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan, setara dengan 2100 kilo kalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.
10. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas dan kebawah sampai derajat ketiga.
11. Keluarga Miskin atau warga miskin adalah seseorang atau kelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya, yang berdomisili di Kota Depok dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kota Depok.
12. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu adalah kebijakan dan program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

13. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
14. Basis Data Terpadu, yang selanjut disingkat BDT adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu dengan tingkat kesejahteraan terendah, yang menjadi acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah.
15. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat TNP2K merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan.
16. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota Depok yang selanjutnya disebut TKPK Kota Depok adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kota Depok.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD Kota Depok adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai Periode Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok terpilih.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu merupakan dokumen perencanaan berisi Program dan Kegiatan Penanggulangan kemiskinan yang disusun dengan target Pencapaian menggunakan Basis Data Terpadu (BDT) dan/atau Data Terpadu Fakir Miskin yang dikeluarkan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu adalah untuk:

- a. menetapkan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dengan target masyarakat miskin dan rentan miskin dalam basis data terpadu (BDT) dan/atau Data Terpadu Fakir Miskin.
- b. memandu intervensi program dan Kegiatan dari perangkat daerah pelaksana penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah dan terstruktur.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu adalah untuk:

- a. menegaskan komitmen dan mendorong sinergi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh semua pihak, untuk mengatasi kemiskinan di Kota Depok;

- b. mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Depok dalam mendukung tujuan pembangunan Nasional.

BAB IV

RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU

Pasal 5

- (1) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu merupakan dokumen rencana aksi program dan kegiatan tahunan penanggulangan kemiskinan Kota Depok dengan sasaran rumah tangga dan individu dalam basis data terpadu (BDT) dan atau Data terpadu Fakir Miskin yang merupakan penjabaran dari Isu strategis dan Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kota Depok.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, program, kegiatan dan target pencapaian sebagai upaya pencapaian penurunan angka kemiskinan Kota Depok tahun 2023

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 6

- (1) Sistematika penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, sebagai berikut:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
memuat latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum penyusunan RAD dan sistematika penulisan Dokumen RAD.

- b. BAB II : PROFIL KEMISKINAN KOTA DEPOK
memuat gambaran umum wilayah Kota Depok yang menjelaskan kondisi fisik yang terdiri atas kondisi geografis dan wilayah administratif, potensi wilayah, dan permasalahan kemiskinan daerah dan juga memuat hasil evaluasi dan hasil monitoring pencapaian target pembangunan dan program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan Tahun 2015-2017.
 - c. BAB III : KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
memuat tentang penjelasan mengenai pendekatan yang dilakukan, model intervensi berdasarkan sasaran dan wilayah miskin di daerah (individu maupun kelurahan/kecamatan) pada Tahun 2019-2023, dan juga memuat target indikator kemiskinan yang dicanangkan untuk 5 (lima) tahun kedepan.
 - d. BAB IV : PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH
memuat penjelasan mengenai rekapitulasi kegiatan yang akan dilakukan dalam kurun waktu Tahun 2019-2023.
 - e. BAB V : PENUTUP
memuat kesimpulan.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Wakil Wali Kota selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Depok melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di tingkat Kota.
- (2) Hasil Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di tingkat kota dilaporkan kepada Wali Kota selaku penanggungjawab TKPK tingkat Kota dan ditembuskan ke Gubernur Jawa Barat selaku penanggung jawab TKPK tingkat Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 12 Oktober 2018

WALI KOTA DEPOK,
TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 12 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,
TTD

HARDIONO
BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 72

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 69 TAHUN 2018
TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KOTA DEPOK 2019-2023

RENCANA AKSI DAERAH
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KOTA DEPOK
TAHUN 2019-2023

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: PROFIL KEMISKINAN KOTA DEPOK
BAB III	: KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
BAB IV	: PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH
BAB V	: PENUTUP

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

DOKUMEN
RENCANA AKSI DAERAH (RAD)
PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU
KOTA DEPOK TAHUN 2019-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar diberbagai belahan dunia, termasuk Indonesia sebagai negara berkembang. Masalah kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek social, ekonomi, budaya dan lainnya.

Upaya penanggulangan kemiskinan sudah dilakukan oleh pemerintah sejak awal kemerdekaan dengan berbagai macam strategi hingga kini. Pengentasan kemiskinan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang juga merupakan tujuan berdirinya Negara Indonesia sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Untuk mencapai tujuan tersebut, upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat saja, namun juga pemerintah daerah.

Tingkat kemiskinan di Kota Depok tahun 2016 dan tahun 2017 dalam posisi tetap yaitu sebesar 2,34 (Data BPS), yang jika dikaitkan dengan RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021 dalam indikator kinerja daerah lingkup bidang Sosial, angka capaian tersebut masih di bawah target yang dicanangkan sebesar 2,18.

Dari hasil capaian indikator kemiskinan dua tahun terakhir yang tetap, maka diperlukan upaya penguatan dan sinkronisasi kegiatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing perangkat daerah (PD), serta mendorong setiap PD untuk terus melakukan inovasi dan fokus pada perencanaan dan penganggaran yang berpihak pada masyarakat miskin dan masyarakat yang status kesejahteraannya terutama pada posisi bawah dalam Basis data Terpadu (BDT)/data fakir Miskin. Dalam rangka mengimplementasikan berbagai program penanggulangan kemiskinan, informasi mengenai siapa yang miskin dan dimana mereka berada menjadi sangat penting dan akan menjadi modal dasar dalam targeting rumah tangga miskin. Dengan kata lain, agar program penanggulangan kemiskinan berhasil dan tepat sasaran, maka ketersediaan data kemiskinan yang terpercaya merupakan suatu keharusan. Di Indonesia sendiri, sumber data mengenai kemiskinan telah tersedia dari berbagai sumber. Namun demikian, sumber yang resmi digunakan oleh pemerintah adalah data kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data kemiskinan yang bersumber dari BPS sering menjadi dasar dalam implementasi program penanggulangan kemiskinan oleh pemerintah. Ada dua jenis data kemiskinan, yaitu data kemiskinan makro dan data kemiskinan mikro. Data kemiskinan makro biasanya digunakan untuk informasi kemiskinan kewilayahan (Provinsi/Kabupaten/Kota), sedangkan kemiskinan mikro lebih banyak digunakan untuk keperluan penentuan rumah tangga sasaran seperti untuk program perlindungan sosial. Salah satu data kemiskinan mikro adalah Basis Data Terpadu (BDT) 2015. Berdasarkan data tersebut Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Kemiskinan Terpadu ini dibuat.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud.

Maksud penyusunan rencana Aksi daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu adalah untuk:

- a. menetapkan program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu dengan target masyarakat miskin dan rentan miskin dalam basis data terpadu (BDT) dan atau Data terpadu Fakir Miskin;
- b. memandu intervensi program dan Kegiatan dari perangkat daerah pelaksana penanggulangan kemiskinan secara terpadu, terarah dan terstruktur.

1.2.2. Tujuan.

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kota Depok Tahun 2019-2021 disusun dengan tujuan:

- a. menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT)/Data Terpadu Fakir Miskin;
- b. kegiatan penanggulangan kemiskinan masing-masing Perangkat Daerah yang terpadu, terarah dan terstruktur.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan RAD

Adapun landasan hukum dari penyusunan RAD ini adalah:

1. Undang-Undang No.13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5235)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
4. Instruksi Presiden Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi penanggulangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Sosial nomor 16 Tahun 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin;
7. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 2032 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 21);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok.

1.4. Sistematika Penyusunan Dokumen RAD

Adapun sistematika Dokumen dalam penyusunan RAD adalah sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan
2. BAB II Profil Kemiskinan Kota Depok
3. BAB III Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan
4. BAB IV Program dan Kegiatan Rencana Aksi Daerah
5. BAB V Penutup

BAB II
PROFIL KEMISKINAN KOTA DEPOK

2. 1. Gambaran Umum Wilayah Kota Depok

2.1.1. Aspek Geografi

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat 6°19'00"-6°28'00" Lintang Selatan dan 106°43'00"-106° 55'30" Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai-sungai yang termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane.

Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.

Dengan luas wilayah kurang lebih 20.029 ha, wilayah perencanaannya meliputi 11 kecamatan yang terdiri dari 63 kelurahan sebagaimana terlihat pada tabel 2.1 dan Gambar 2.1 dibawah ini.

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Depok Menurut Kecamatan

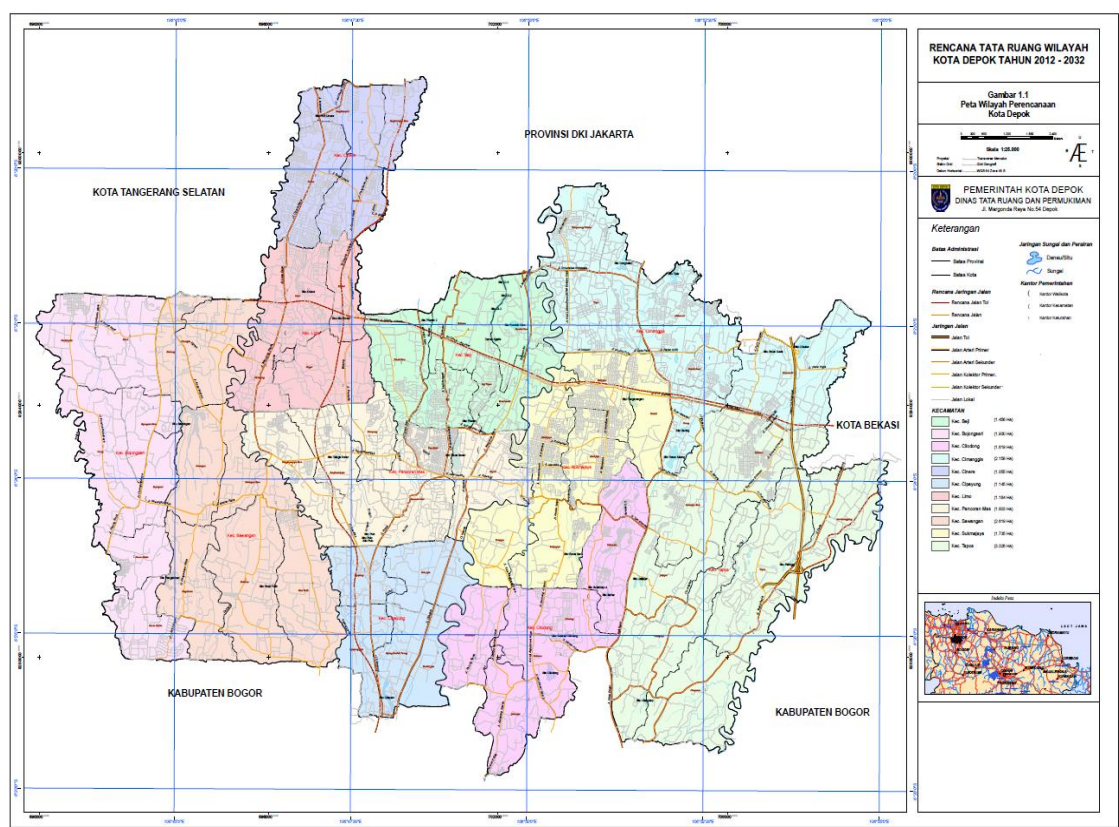
NO	KECAMATAN	LUAS (HA)	NO	KECAMATAN	LUAS (ha)
I	BEJI	1,456	VII	CINERE	1,055
1	Beji	194	33	Cinere	366
2	Beji Timur	71	34	Gandul	264
3	Kemiri Muka	169	35	Pangkalan Jati	268
4	Pondok Cina	335	36	Pangkalan Jati Baru	158

5	Kukusan	340	VIII	CIMANGGIS	2,158
6	Tanah Baru	347	37	Cisalak Pasar	181
II	PANCORAN MAS	1,803	38	Mekarsari	385
7	Pancoran Mas	350	39	Tugu	542
8	Depok Jaya	119	40	Pasirgunung Selatan	271
9	Depok	366	41	Harjamukti	592
10	Rangkapan Jaya Baru	382	42	Curug	187
11	Rangkapan Jaya	370	IX	TAPOS	3,326
12	Mampang	217	43	Tapos	632
III	CIPAYUNG	1,145	44	Leuwinanggung	425
13	Cipayung	214	45	Sukatani	476
14	Cipayung Jaya	235	46	Sukamaju Baru	425
15	Ratujaya	305	47	Jatijajar	265
16	Bojong Pondok Terong	220	48	Cilangkap	614
17	Pondok Jaya	171	49	Cimpauen	489
			X	SAWANGAN	2,619
IV	SUKMAJAYA	1,735	50	Sawangan	329
18	Sukmajaya	333	51	Kedaung	211
19	Mekarjaya	326	52	Cinangka	343
20	Baktijaya	253	53	Sawangan Baru	276
21	Abadijaya	267	54	Pengasinan	406
22	Tirtajaya	288	55	Bedahan	586
23	Cisalak	268	56	Pasir Putih	469
V	CILODONG	1,619	XI	BOJONGSARI	1,930
24	Sukamaju	433	57	Bojongsari	206
25	Cilodong	218	58	Bojongsari Baru	197
26	Kalibaru	328	59	Pondok Petir	307

27	Kalimulya	305	60	Serua	321
28	Jatimulya	335	61	Curug	421
VI	LIMO	1,184	62	Duren Mekar	191
29	Limo	413	63	Duren Seribu	287
30	Meruyung	216	KOTA DEPOK		20.029
31	Grogol	364			
32	Krukut	191			

Sumber : Naskah Akademis RTRW 2012-2032

Gambar 2.1 Peta Wilayah Kota Depok



Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

2.1.2. Aspek Topografi

Secara umum topografi Wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah, dengan elevasi antara 50140 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lerengnya 0%-25% (Sumber: Bakosurtanal). Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar 200,29 km², dengan kondisi geografisnya dialiri oleh sungai-sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ.

Bagian Utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah bergelombang. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas.

Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos. Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8 %, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai.

2.1.3. Aspek Geologi

Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:

- a. Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir, umumnya tersingkap di jalur-jalur sungai, tingkat kesuburan sedang-tinggi.
- b. Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO₂ dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
- c. Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
- d. Komplek alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.

- e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburannya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.
- f. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

2.1.4. Aspek Klimatologi

Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson, musim kemarau bulan April–September dan musim penghujan antara bulan Oktober–Maret. Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama.

Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:

- Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata : 82 %
- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
- Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif sama dengan kadar curah hujan sepanjang tahun, yang ditandai oleh perbedaan curah hujan yang cukup kecil. Curah hujan di Kota Depok terdiri dari:

- a. 1500–2000 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok;
- b. 2000–2500 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok;
- c. 2500–3000 mm/thn, terjadi di bagian tengah wilayah Kota Depok;
- d. 3000–3500 mm/thn, terjadi di wilayah selatan–timur Kota Depok.

2. 2. POTENSI SUMBER DAYA AIR

Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi kedua sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari SWS Ciliwung, antara lain Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Kesemuanya itu hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta.

Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ di Kota Depok berjumlah 31 buah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.2 dibawah ini. Beberapa situ sudah berubah fungsi karena mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman. Luas keseluruhan situ dan danau yang ada di Kota Depok berdasarkan data Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air tahun 2013 adalah kurang lebih seluas 159,15 Ha atau sekitar 0,79% dari luas Kota Depok. Kedalaman situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter.

Situ di Kota Depok belum banyak dimanfaatkan sebagai sumber air bersih. Penduduk Kota Depok masih memanfaatkan air tanah sebagai sumber air bersih bagi kegiatan masyarakat sehari-hari. Sekitar delapan puluh enam persen (86%) penduduk Kota Depok memanfaatkan air tanah atau sumber lainnya sebagai sumber air bersih dan empat belas persen (14%) penduduk Kota Depok memanfaatkan air bersih yang berasal dari PDAM. Eksploitasi air tanah yang sangat pesat dan tanpa dimbangi dengan upaya-upaya konservasi telah menyebabkan terjadinya penurunan air muka tanah. Hal tersebut dapat dilihat dari turunnya permukaan air tanah di Kota Depok sebesar dua puluh (20) cm per tahun.

Tabel 2.2 Sebaran dan Luas Situ di Kota Depok

NO	SITU	LOKASI (KELURAHAN)	LUAS (ha)
1	Rawa Gede	Harjamukti	1,40
2	Gemblung	Harjamukti	7,20
3	Tipar	Mekarsari	8
4	Pedongkelan	Tugu	6,25
5	Gadog	Cisalak Pasar	1,30
6	Rawa Kalong	Curug	8,25
7	Patinggi	Tapos	5,50
8	Jatijajar	Jatijajar	6,50
9	Cilangkap	Cilangkap	6,00
10	Asih Pulo	Rangkapan Jaya	4,40
11	Rawa Besar	Depok Jaya	13,00
12	Pitara	Pancoran Mas	0,60
13	Telaga Subur	Pancoran Mas	1,50
14	Citayam	Bojong Pondok Terong	7,00
15	Pengasinan	Pengasinan	6,00
16	Bojongsari	Sawangan	28,50
17	Pladen	Beji	1,50
18	Universitas Indonesia (UI 1, UI 2, UI 3, UI 4)	Pondok Cina	17,50
19	Pasir Putih	Pasir Putih	-
20	Ciming	Bakti Jaya	1,50
21	Bunder	Cisalak	2,00
22	Sidomukti	Sukmajaya	7,50
23	Pengarengan	Cisalak	7,00
24	Cilodong	Kalibaru	9,50
25	Bahar	Sukamaju	1,25
26	Krukut	Krukut	-

27	Lembah Gurame	Depok Jaya	-
28	Cinere	Pangkalan Jati	-

Sumber : RTRW Kota Depok Tahun 2012-2032

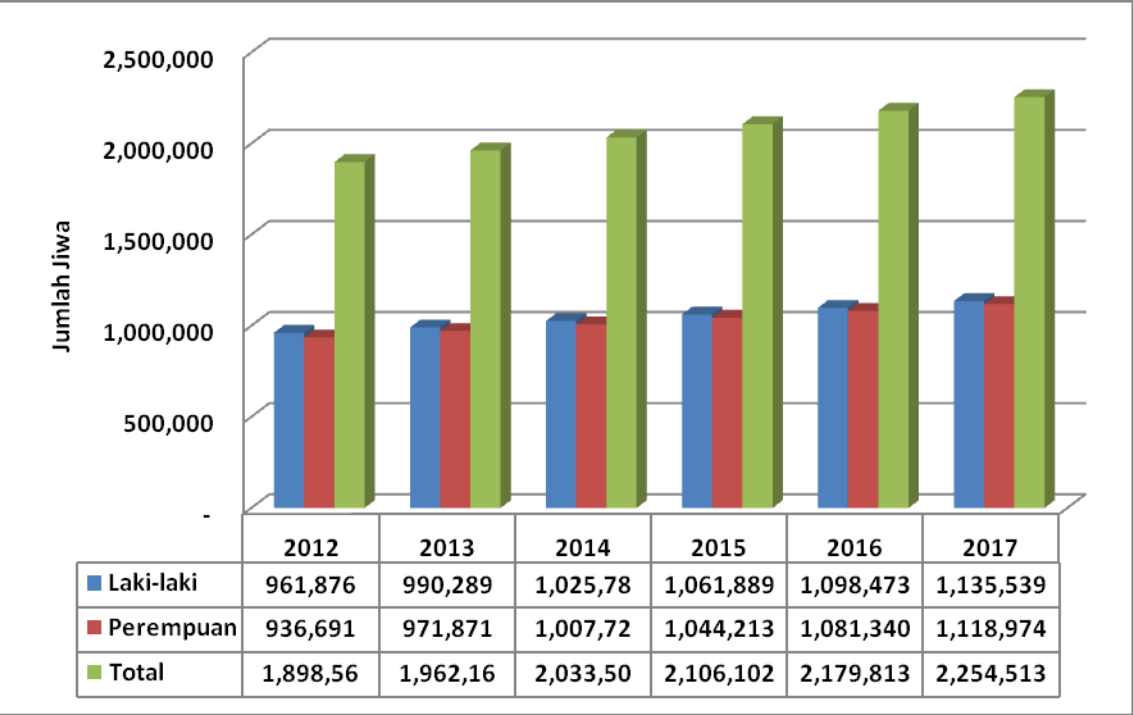
2. 3. POTENSI BENCANA ALAM

Potensi rawan bencana yang terdapat di Kota Depok adalah rawan bencana banjir, rawan bencana longsor dan rawan bencana kebakaran. Kawasan rawan bencana banjir berada daerah perumahan di dataran rendah yang tersebar di Kelurahan Depok, Kelurahan Mampang, Kelurahan Tugu, Kelurahan Sawangan, Kelurahan Kalimulya dan Kelurahan Cipayung. Faktor penyebab terjadinya bencana ini adalah lama dan intensitas hujan yang tinggi, meluapnya air sungai karena kemiringan dasar saluran kecil dan kapasitas aliran sungai tidak memadai, dan sistem drainase yang tidak memadai. Kawasan rawan longsor berada di sempadan Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan dan Situ Pedongkelan. Sedangkan kawasan rawan bencana kebakaran terdapat di sekitar permukiman padat penduduk dan bangunan di Kelurahan Depok, Kelurahan Depok Jaya, Kelurahan Sukmajaya, dan Kelurahan Tugu.

2.3.1. Aspek Demografi

Berdasarkan data BPS, Kota Depok pada Tahun 2017 dihuni oleh 2.254.513 jiwa dengan komposisi jumlah penduduk laki-laki sebanyak 1.135.539 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebesar 1.118.974 jiwa. Persentase pertumbuhan penduduk Tahun 2017 diperkirakan sebesar 3,43 persen dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan jumlah penduduk Kota Depok dari tahun 2012 hingga 2017 dapat dilihat pada grafik 2.1.

Grafik 2.1. Perkembangan Penduduk Kota Depok Tahun 2012–2017



Sumber : Data Gender Dan Anak Kota Depok 2017

Pertumbuhan penduduk yang terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh tingginya arus migrasi dan kelahiran di Kota Depok.

Dari sisi kepadatan penduduk, kepadatan rata-rata Kota Depok Tahun 2017 mencapai 11.256 jiwa/km² dengan kecamatan terpadat adalah Kecamatan Sukmajaya (16.790 jiwa/km²), Kecamatan Beji (15.061 jiwa/km²) dan Kecamatan Pancoran Mas (15.025 jiwa/km²). Sedangkan kecamatan dengan kepadatan relatif rendah adalah Kecamatan Sawangan (6.160 jiwa/km²) dan Bojongsari (6.507 jiwa/km²). Meskipun Kecamatan Cimanggis berpenduduk paling banyak (313.987 jiwa), namun tidak menjadikannya sebagai kecamatan dengan penduduk terpadat. Hal ini karena wilayah kecamatan Cimanggis relatif lebih luas dibandingkan dengan kecamatan lainnya yaitu 21,22 km².

Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kecamatan, dan Kepadatan Penduduk di Kota Depok Tahun 2017 tersaji pada tabel 2.3.

Tabel 2.3 Penduduk menurut Jenis Kelamin, Kecamatan dan Kepadatan di Kota Depok Tahun 2017

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Luas Wilayah (Km2)	Kepadatan Penduduk/ (Km2)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sawangan	81.279	78.334	159.613	25,91	6.160
2	Bojongsari	65.473	63.421	128.894	19,81	6.507
3	Pancoran Mas	137.438	136.009	273.447	18,20	15.025
4	Cipayung	84.046	81.315	165.361	11,63	14.218
5	Sukmajaya	149.975	152.744	302.719	18,03	16.790
6	Cilodong	81.741	80.125	161.866	16,08	10.066
7	Cimanggis	158.734	155.253	313.987	21,22	14.797
8	Tapos	140.750	139.371	280.121	32,33	8.664
9	Beji	108.925	106.290	215.215	14,29	15.061
10	Limo	57.550	56.134	113.684	12,32	9.228
11	Cinere	69.628	69.978	139.606	10,47	13.334
	Kota Depok	1.135.539	1.118.974	2.254.513	200,29	11.256

Sumber : Data Gender Dan Anak Kota Depok 2017

Berdasarkan data Indikator Pembangunan Kecamatan Kota Depok tahun 2017, proporsi kelompok usia muda (0-14 tahun) sebesar 24,51 persen menurun dibanding tahun 2016 yang sebesar 26,96 persen, usia produktif (15-64 tahun) mencapai 70,25 persen menurun dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 70,46 persen, dan usia lanjut (65 tahun ke atas) mencapai 5,24 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 3,07 persen. Dengan demikian, angka ketergantungan/beban tanggungan Kota Depok Tahun 2017 mencapai 42,35. Angka tersebut bermakna bahwa 100 orang kelompok usia produktif menanggung beban sebanyak 42 orang kelompok non produktif.

Jika dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, total jumlah penduduk laki-laki di Depok lebih tinggi daripada total jumlah penduduk perempuan. Secara keseluruhan, rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan Kota Depok tahun 2017 sebesar 101,48. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 100 penduduk perempuan terdapat 101 penduduk laki-laki. Namun dalam rentang umur 13 hingga 18 tahun, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 96 penduduk laki-laki. Sementara dalam kelompok umur 60 tahun ke atas, dalam 100 penduduk perempuan terdapat 95 penduduk laki-laki.

Tabel 2.4 Jumlah Penduduk dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kelompok Umur di Kota Depok Tahun 2017

Kelompok Umur (tahun)	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio Jenis Kelamin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 - 5	135.099	127.426	262.525	106,02%
6 - 12	132.911	126.652	259.563	104,94%
13 - 18	109.616	113.059	222.675	96,95%
19 - 55	668.304	662.077	1.330.381	100,94%
56 – 60	37.763	35.526	73.289	106,30%
60 tahun ke atas	51.846	54.234	106.080	95,60%
Jumlah	1.135.539	1.118.974	2.254.513	101,48%

Sumber : Data Gender Dan Anak Kota Depok 2017

2.3.2. Kondisi Umum Kemiskinan Kota Depok

Perkembangan jumlah penduduk miskin di Kota Depok selama empat tahun terakhir adalah sebagai berikut (Tabel 2.5).

Tabel 2.5 Perkembangan Persentase dan Jumlah Penduduk Miskin di Kota Depok

No	Tahun	Jumlah Penduduk (jw)	JumlahPenduduk Miskin (jw)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2014	2.033.500	47.950	2.32
2	2015	2.106.100	49.970	2.40
3	2016	2.179.813	50.560	2.34
4	2017	2.254.513	52.338	2.34

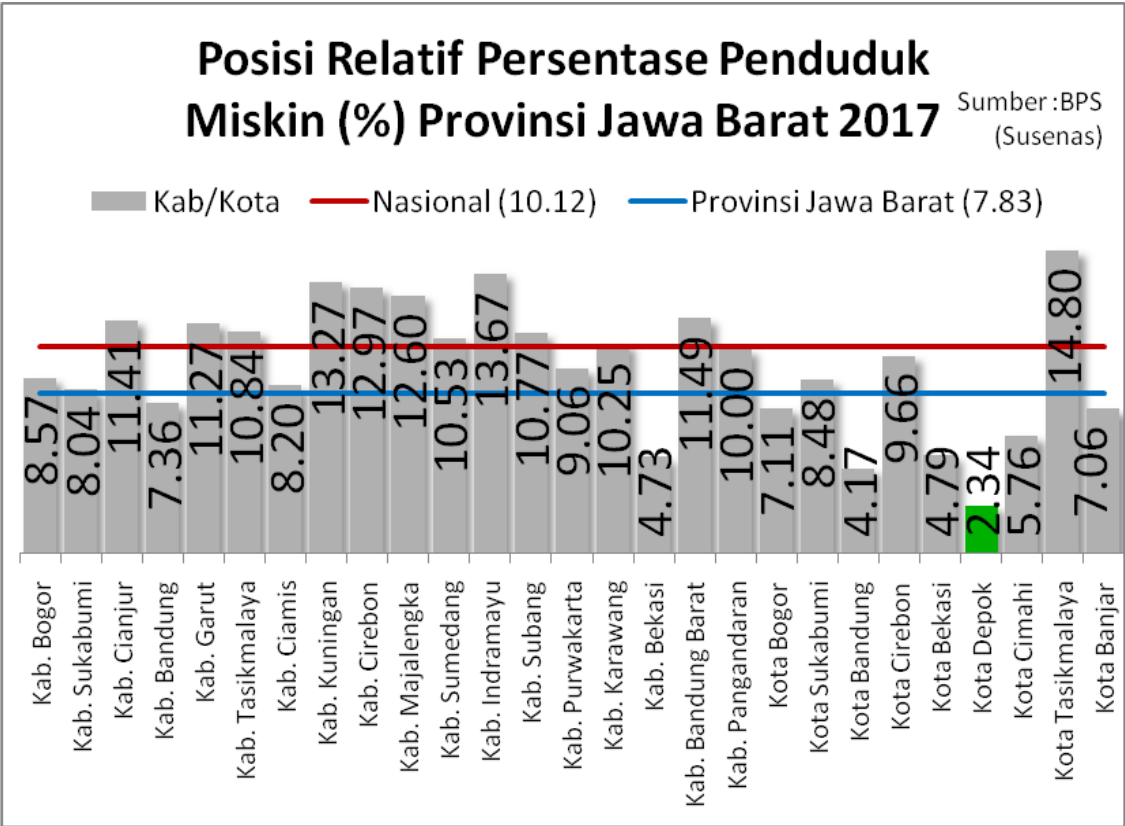
Sumber: Depok Dalam Angka

Dalam Tabel 2.5 terlihat bahwa persentase penduduk miskin di Kota Depok dari tahun ke tahun selama empat tahun terakhir berfluktuasi, pada tahun 2014 persentase penduduk miskin 2.32%, tahun 2015 naik menjadi 2.40%, dan tahun 2016 dan 2017 turun menjadi 2.34. persentase penduduk miskin provinsi Jawa Barat 7.83%, Nasional sebesar 10.12%.

2. 4. ANALISIS

2. 4. 1. Analisis Posisi Relatif

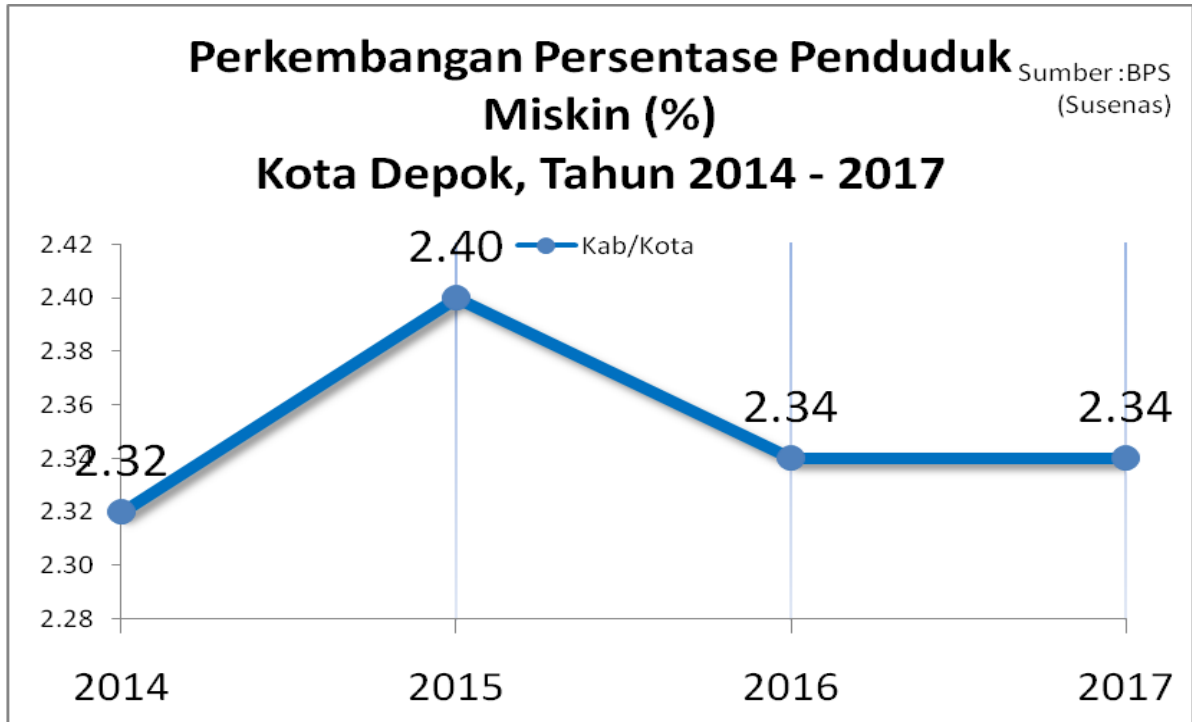
Grafik 2.2 Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2017



Dilihat dari posisi relatif, Kota Depok termasuk daerah yang memiliki Persentase Penduduk Miskin (P0) pada tahun 2017 sudah cukup rendah, bahkan merupakan daerah dengan persentase penduduk miskin paling rendah di provinsi Jawa. Pada tahun 2017 persentase kemiskinan di Kota Depok mencapai 2,34 persen, dimana capaian provinsi 7,83 persen dan nasional 10,12 persen.

2. 4. 2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

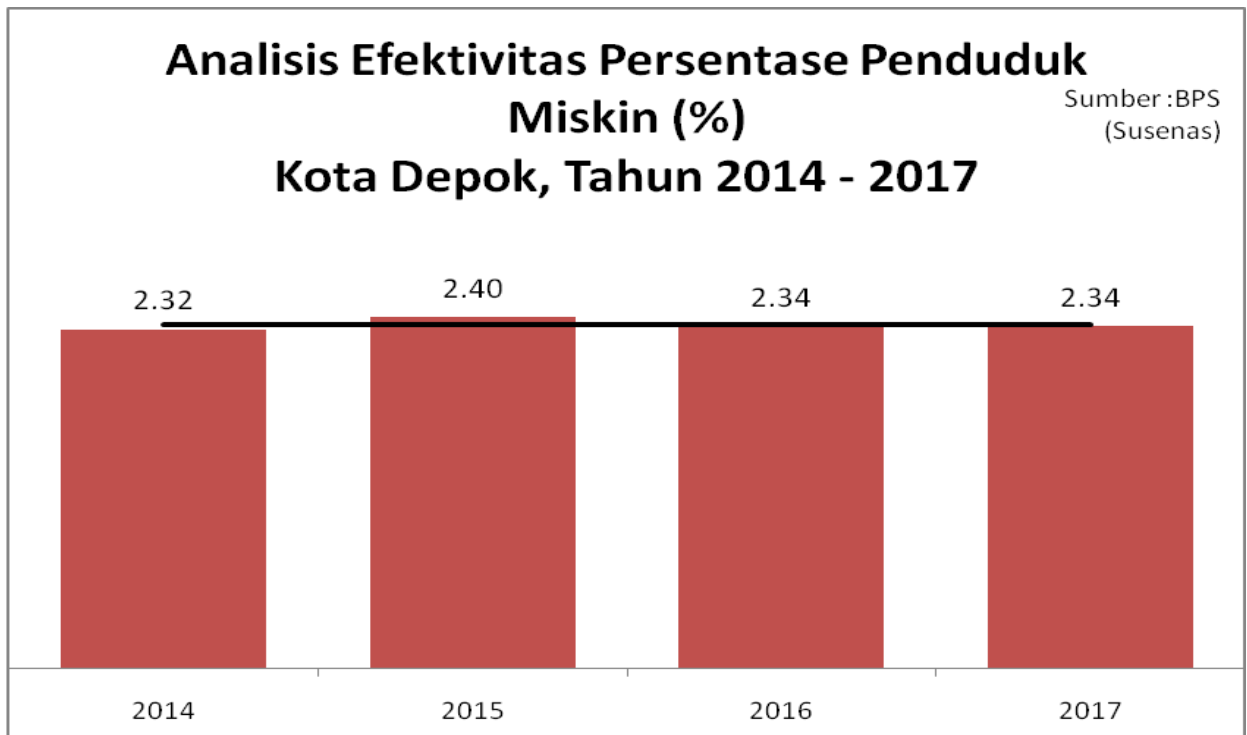
Grafik 2.3 Perkembangan Antar Waktu Persentase Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2014 - 2017



Sementara itu, bila dilihat dari perkembangan antar waktu dalam empat tahun terakhir capaian persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2014 lebih baik yaitu 2,32, tahun 2015 mengalami peningkatan persentase penduduk miskin, namun dapat diturunkan kembali di tahun 2016 dan 2017 yaitu sebesar 2.34 %. Hal ini diharapkan dapat terus diturunkan untuk mencapai target RPJMD yaitu sebesar 2,18 di tahun 2021.

2. 4. 3. Analisis Efektifitas

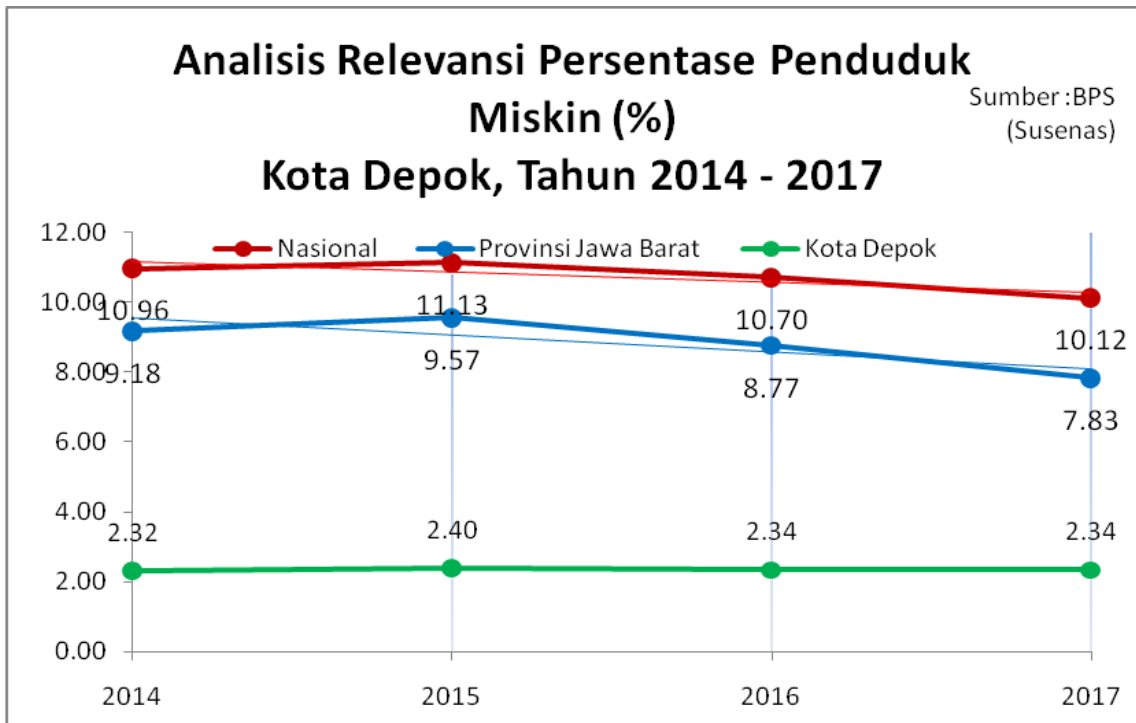
Grafik 2.4 Grafik Efektifitas Persentase Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2014 – 2017



Grafik efektifitas persentase penduduk miskin kota Depok menunjukkan konsistensi penurunan capaian tingkat kemiskinan kota Depok dalam 4 tahun terakhir, walau rata-rata penurunan pertahun tidak terlalu signifikan. Namun hal ini menunjukkan bahwa strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang telah dijalankan di kota Depok dalam upaya penanggulangan kemiskinan belum cukup efektif untuk menekan angka tingkat kemiskinan lebih rendah lagi setiap tahunnya.

2. 4. 4. Analisis Relevansi

**Grafik 2.5 Grafik Relevansi Tingkat Kemiskinan Kota Depok
Tahun 2014 – 2017**



Capaian tingkat kemiskinan kota Depok dalam 4 tahun terakhir juga terjadi pada tingkat provinsi Jawa Barat dan Nasional, dimana di mulai tahun 2014, untuk selanjutnya tahun 2015 Kota Depok mengalami peningkatan dalam persentase kemiskinan hal ini diikuti juga dengan kondisi yang sama untuk provinsi dan nasional dan tahun 2016 – 2017 nasional dan provinsi mengalami penurunan namun Kota Depok dari tahun 2016 ke 2017 stagnan, upaya yang dilakukan belum memberikan dampak yang baik bagi penurunan tingkat kemiskinan.

2. 5. Jumlah Penduduk Miskin

2.5. 1. Analisis Posisi Relatif

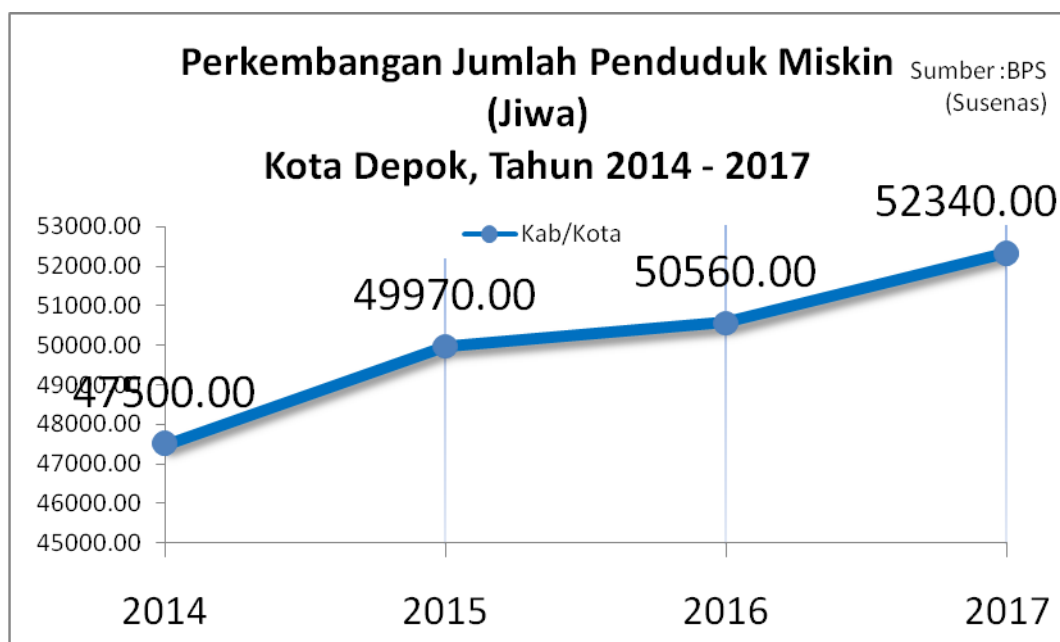
Grafik 2.6 Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Depok Tahun 2017



Jumlah penduduk miskin (jiwa) kota Depok tahun 2017 sebanyak 52.340 jiwa. Artinya dari total jumlah penduduk kota Depok secara keseluruhan pada tahun 2017, masih ada 52.340 jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Bila dibandingkan dengan daerah lain di provinsi Jawa Barat, kota Depok merupakan daerah kelima dengan jumlah penduduk miskin paling sedikit. Perlu upaya yang lebih serius dari semua pemangku kepentingan untuk bisa mengurangi jumlah penduduk miskin di Kota Depok.

2.5. 2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

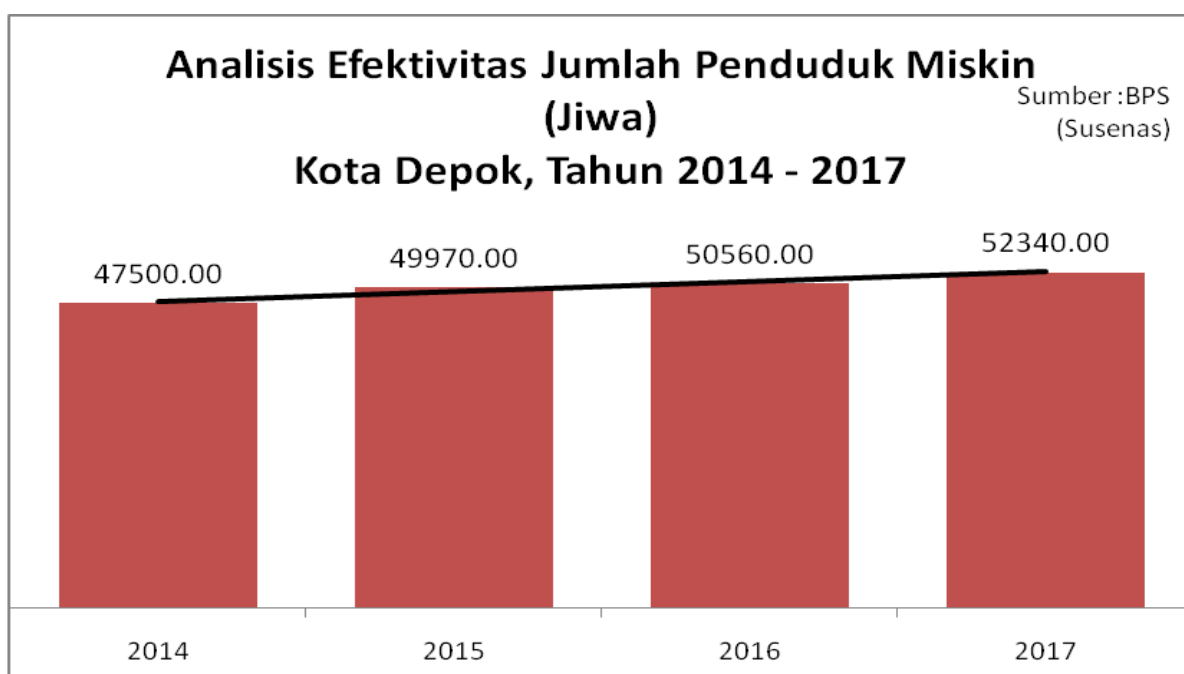
Grafik 2.7 Perkembangan Antar Waktu Jumlah Penduduk Miskin Kota Depok Tahun 2014 – 2017



Jumlah penduduk miskin (jiwa) Kota Depok dalam 4 (empat) tahun terakhir mengalami peningkatan dari tahun 2014-2017.

2.5. 3. Analisis Efektifitas

Grafik 2.8 Efektifitas Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) Kota Depok Tahun 2014 – 2017

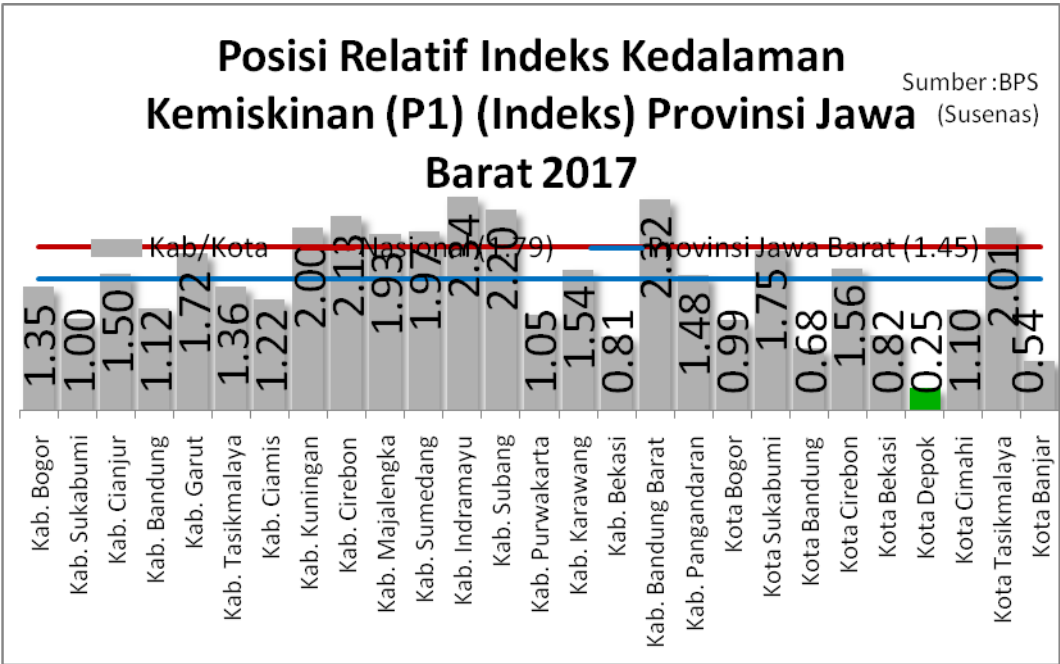


Strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sudah dikerjakan oleh semua pemangku kepentingan belum efektif terbukti belum mampu mengurangi jumlah penduduk miskin (jiwa) Kota Depok dalam 4 tahun terakhir, malah meningkat setiap tahunnya, peningkatan rata-rata 1200 jiwa setiap tahunnya.

2. 6. Indeks Kedalaman Kemiskinan

2. 6. 1. Analisis Posisi Relatif

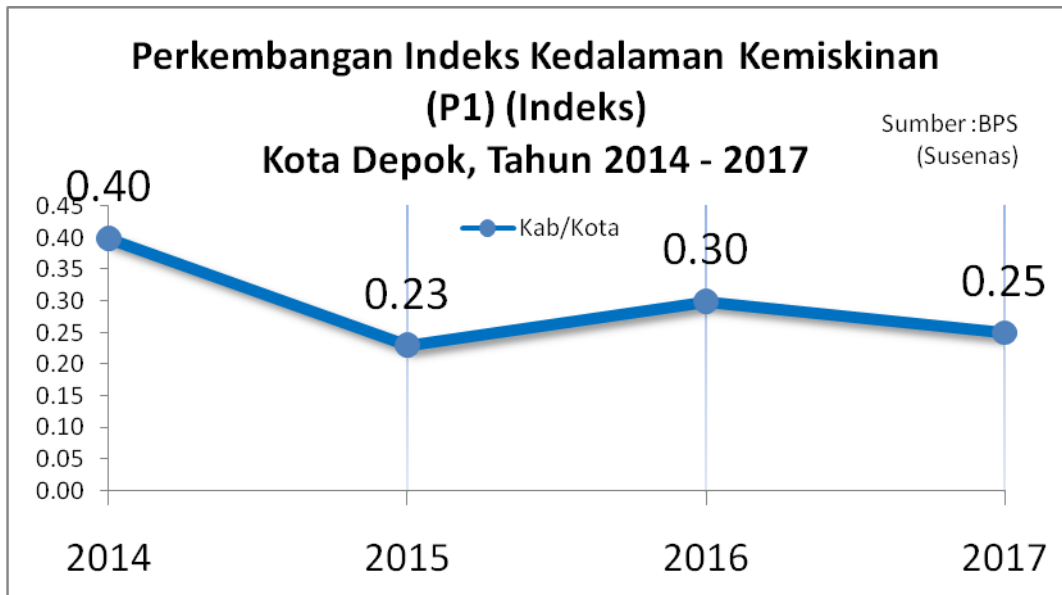
Grafik 2.9 Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Depok
Tahun 2017



Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan jarak antara rata-rata kemampuan pengeluaran per kapita per bulan masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan terhadap Garis Kemiskinan (GK). Grafik di atas menunjukkan bahwa posisi relatif indeks kedalamann kemiskinan (P1) kota Depok pada tahun 2017 sebesar 0,25. Indek kedalaman kemiskinan Kota Depok merupakan daerah dengan indeks kedalaman kemiskinan yang paling rendah di provinsi Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat miskin Kota Depok sudah jauh lebih baik bila dibandingkan rata-rata kemampuan masyarakat miskin di daerah lain di provinsi Jawa Barat dan Nasional.

2. 6. 2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

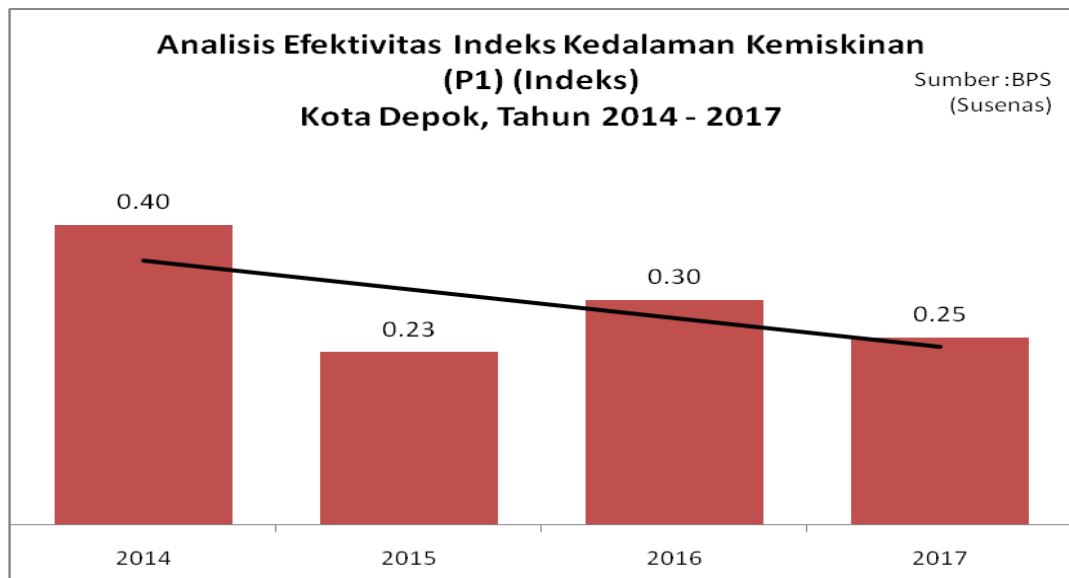
Grafik 2.10 Perkembangan Antar Waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Depok Tahun 2014 – 2017



Grafik perkembangan antar waktu Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di tahun 2015 menunjukkan meningkatnya kemampuan masyarakat miskin di Kota Depok dalam memenuhi kebutuhan paling dasar dengan turunnya indek kedalaman kemiskinan sebesar 0,17, namun tahun 2016 mengalami penurunan kembali dikarenakan naik nya indek kedalaman kemiskinan, dan tahun 2017 kembali mengalami peningkatan dengan turunnya indek kedalaman kemiskinan. Dari grafik diatas terlihat bahwa upaya penanggulangan kemiskinan belum menunjukkan konsistensi dalam pencapaian penurunan indek kedalamn kemiskinan dan laju inflasi tidak diikuti oleh peningkatan pendapatan masyarakat miskin.

2. 6. 3. Analisis Efektifitas

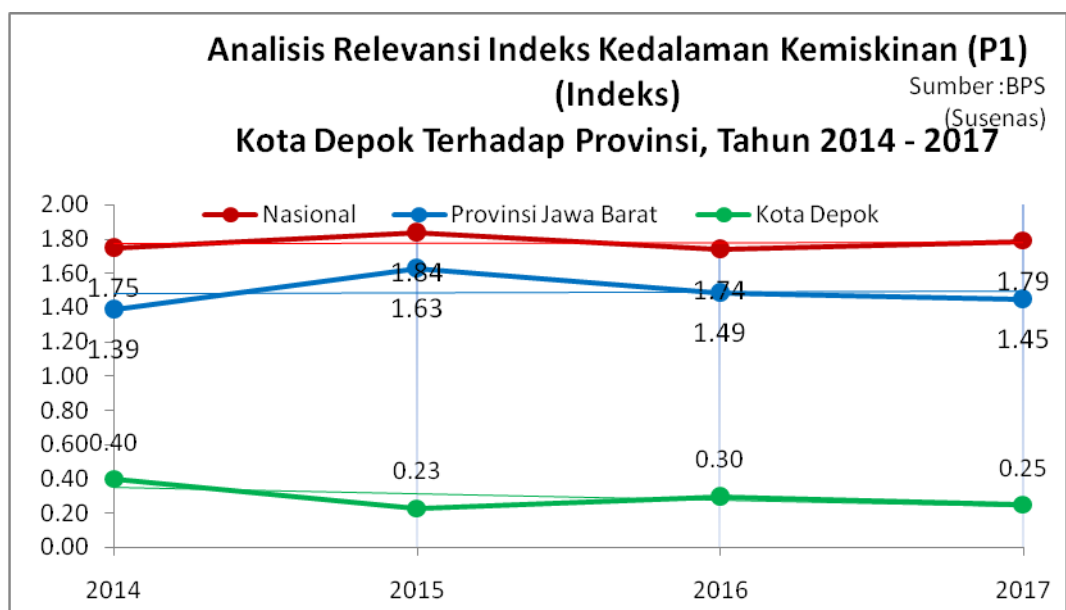
Grafik 2.11 Efektifitas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Depok Tahun 2014 – 2017



Secara umum terlihat efektifitas perbaikan terhadap capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kota Depok dalam 4 (empat) tahun terakhir (2010 – 2013). Walau perbaikan yang terjadi tidak terlalu signifikan namun kondisi ini menunjukkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang sudah dilakukan oleh semua pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan cukup efektif dalam memperbaiki capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di kota Depok dalam 4 tahun terakhir.

2. 6. 4. Analisis Relevansi

Grafik 2.12 Relevansi Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Depok Tahun 2014 – 2017

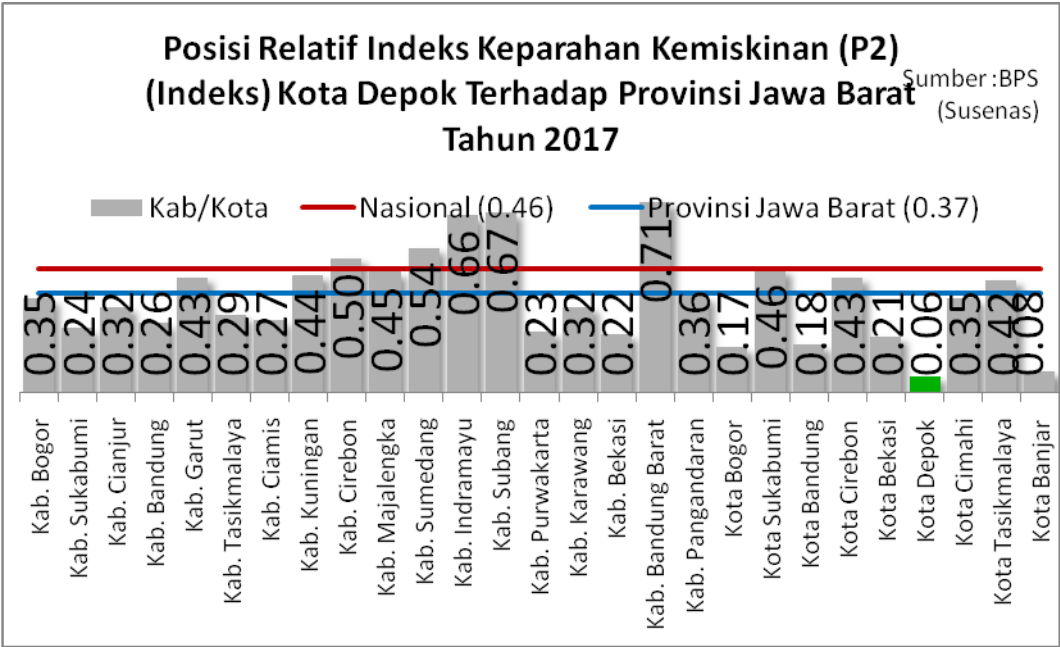


Capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Depok Tahun 2015 dan Tahun 2016 tidak relevan dengan capaian nasional dan provinsi, di Tahun 2015 Kota Depok mengalami penurunan Indeks Kedalaman Kemiskinan namun provinsi dan nasional mengalami kenaikan, sedangkan Tahun 2017 Kota Depok mengalami penurunan relevan dengan provinsi. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh inflasi cukup berdampak terhadap kemampuan masyarakat miskin di Kota Depok pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan dampaknya terhadap masyarakat miskin di daerah lainnya di Indonesia.

2. 7. Indeks Keparahan Kemiskinan

2. 7. 1. Analisis Posisi Relatif

Grafik 2.13 Posisi Relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Depok Tahun 2017

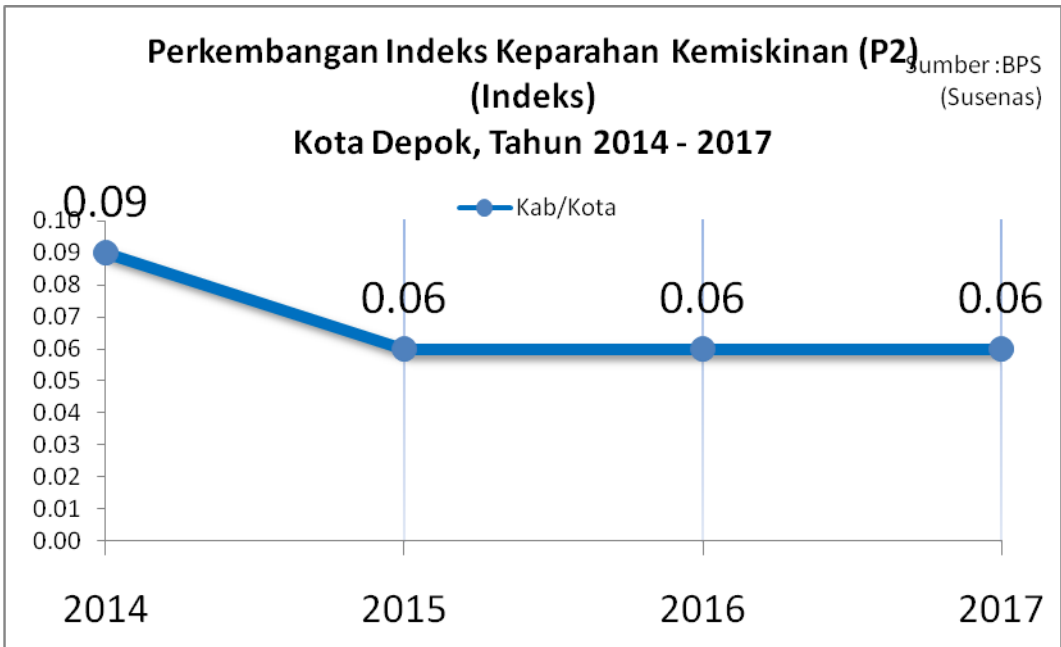


Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menjelaskan ketimpangan kemampuan antar masyarakat yang hidup di bawah GK pada suatu daerah.Semakin besar Indeks menunjukkan semakin timpang kemampuan antar masyarakat miskin.

Grafik posisi relatif indeks keparahan kemiskinan (P2) kota Depok pada tahun 2017 menunjukkan capaian yang sudah cukup baik, sudah lebih baik dari capaian provinsi Jawa Barat dan nasional. Bahkan Kota Depok merupakan daerah dengan indeks keparahan kemiskinan (P2) yang paling rendah dari seluruh daerah di provinsi Jawa Barat pada tahun 2017 dengan indeks sebesar 0.06.

2. 7. 2. Analisis Perkembangan Antar Waktu

Grafik 2.14 Perkembangan Antar Waktu Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Depok Tahun 2014 – 2017

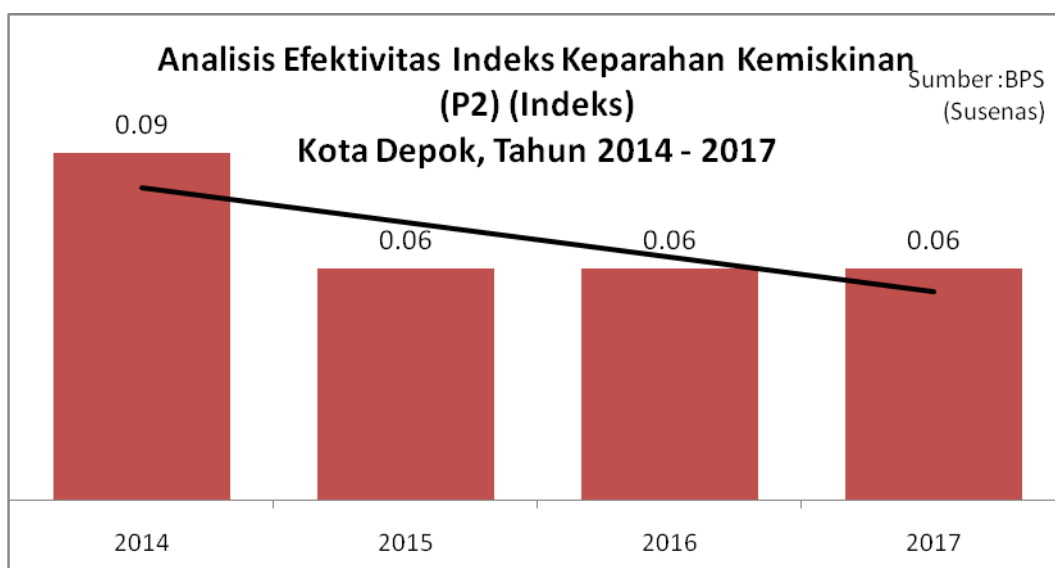


Capaian Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Depok tahun 2014 – 2017 memiliki pola yang sama dengan capaian Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Tahun 2015 menunjukan perbaikan, namun Tahun 2016 dan 2017 stagnan, dimana upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan tidak dapat menurunkan indeks keparah kemiskinan. Melihat indeks yang sudah cukup rendah dan tetap perlu upaya yang lebih optimal dalam menurunkan P1 dan P2 mengingat kemiskinan yang tersisa adalah kemiskinan kronis. Kemiskinan kronis hanya akan dapat diatasi dengan program yang lebih terarah, menyasar individu dan rumah tangga miskin sesuai dengan masalah dan kebutuhan masyarakat miskin itu sendiri.

Selain itu komplementaritas program harus diberikan bagi masyarakat yang termasuk kedalam miskin kronis, tidak hanya menyangkut pemenuhan kebutuhan pangan saja, namun kebutuhan non pangan juga harus diberikan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan dan lain sebagainya.

2. 7. 3. Analisis Efektifitas

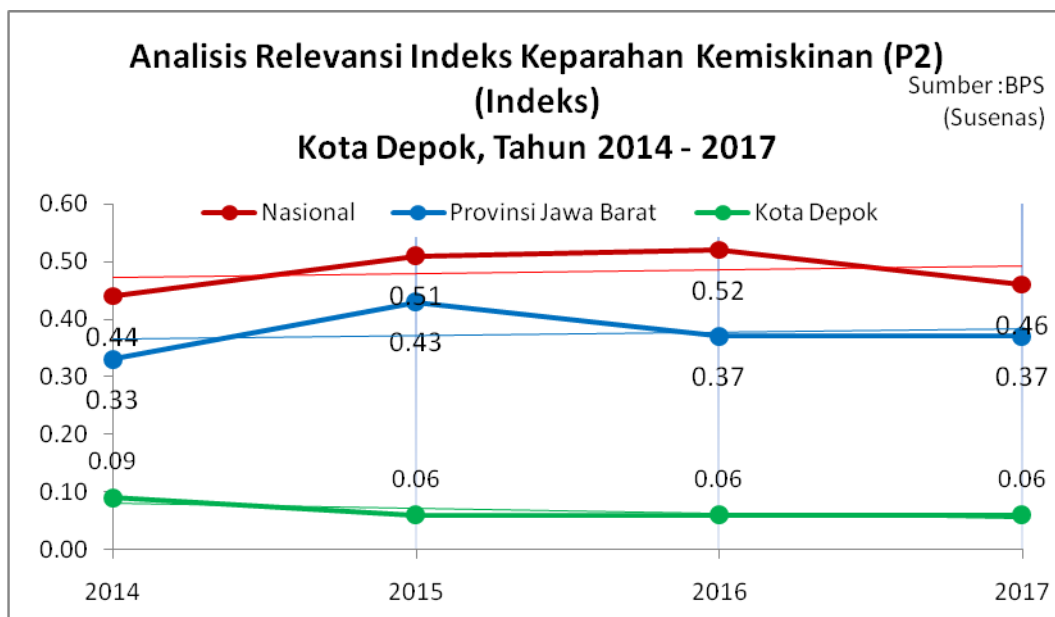
**Grafik 2.15 Efektifitas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
Kota Depok tahun 2014 – 2017**



Sementara itu, bila dilihat dari sisi efektifitas perbaikan capaian indeks keparahan kemiskinan (P2) dalam 4 (empat) tahun terakhir (2014-2017) secara umum belum efektif, Artinya setiap upaya penanggulangan kemiskinan yang sudah dikerjakan oleh setiap pemangku kepentingan di Kota Depok belum cukup efektif dalam memperbaiki kesenjangan kemampuan antar masyarakat miskin (masih jalan ditempat).

2. 7. 4. Analisis Relevansi

Grafik 2.16 Relevansi Indeks Keparahkan Kota (P2) Kota Depok Tahun 2014 – 2017



Capaian Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kota Depok tahun 2015 cukup baik dibandingkan dengan provinsi dan nasional, Tahun 2016 tidak relevan dengan provinsi yang mengalami penurunan namun Kota Depok tetap di 0,6, Tahun 2017 capaian indek keparahan kemiskinan relevan dengan provinsi (stagnan) tetapi tidak relevan dengan nasional yang mengalami penurunan. Dari grafik dapat ditarik kesimpulan bahwa kesenjangan kemampuan penduduk miskin stagnan selama periode Tahun 2015-2017. Untuk itu program dan intervensi yang akan dilakukan harus mampu mengurangi kesenjangan kemampuan antar masyarakat miskin di Kota Depok agar Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) menurun.

2. 8. Evaluasi dan hasil monitoring pencapaian Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT)

Berdasarkan hasil pemutakhiran Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2015, jumlah rumah tangga yang tercakup dalam kelompok 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah di Kota Depok sebanyak 74.287 rumah tangga. Jumlah kelompok rumah tangga termiskin atau yang berada pada kelompok desil 1 sebanyak 37.558 rumah tangga. Keberadaan rumah tangga BDT terbanyak berada di Kecamatan Tapos (13.379 rumah tangga).

Sedangkan jumlah rumah BDT terendah di Kecamatan Cinere, sebanyak 2282 rumah tangga. Secara lengkap distribusi jumlah rumah tangga BDT di Kota Depok menurut kecamatan disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan

KECAMATAN	Desil 1 (termiskin)	Desil 2	Desil 3	Desil 4	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SAWANGAN	4,788	1,947	326	92	7,153
BOJONGSARI	3,241	1,441	305	88	5,075
PANCORAN MAS	4,661	3,572	859	305	9,397
CIPAYUNG	4,617	2,877	648	214	8,356
SUKMAJAYA	2,917	2,349	703	350	6,319
CILODONG	2,231	1,339	326	108	4,004
CIMANGGIS	2,854	2,997	1,057	416	7,324
TAPOS	6,585	5,104	1,313	377	13,379
BEJI	2,706	2,744	816	306	6,572
LIMO	2,172	1,699	407	148	4,426
CINERE	786	955	379	162	2,282
KOTA DEPOK	37,558	27,024	7,139	2,566	74,287

Dalam pembahasan dan penyajian tabel di bagian ini, rumah tangga BDT dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu kelompok Desil 1 yang berisi 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah, kelompok Desil 2 yang berisi 10 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan di atas Desil 1. Kelompok berikutnya adalah kelompok Desil 3 yang berisi 10 rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan diatas Desi 2 dan Kelompok Desil 4 yang berisi 10 persen rumah tangga dngan tingkat kesejahteraan di atas Desil 3. Pembagian rumah tangga ke dalam 4 kelompok desil dilakukan pada tingkat nasiona) dan mengbasiJkan distribusi jumlah rumah tangga yang sama pada setiap kelompok desil. Namun saat data BDT dipecah per daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota), distribusi rumah tangga antar kelompok desil dalam satu daerah bisa menjaditidak sama. Sehingga proporsi jumlah rumah tangga BDT Kota Depok antara kelompok desil 1 dengan kelompok desil lainnya tidak sama.

2. 9. Karakteristik Rumah Tangga

2. 9. 1. Perumahan

Rumah atau tempat tinggal merupakan tempat istirahat dan berlindung. Berdasarkan data BDT; persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri di Kota Depok sebesar 76,0 persen. Pada kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah, yaitu kelompok desil 1 persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri sebesar 70,8 persen. Dari Tabel 2.8 terlihat semakin tinggi tingkat kesejahteraan semakin besar persentase rumah tangga yang memiliki rumah sendiri. Sebaliknya, untuk rumah tangga dengan status kepemilikan rumahnya kontrak/sewa semakin tinggi tingkat kesejahteraannya semakin rendah persentasenya.

Tabel 2.8 Persentase Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Status Kepemilikan Tempat Tinggal

Status Kepemilikan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Milik sendiri	70.8	80.0	84.2	87.0	76.0
Kontrak/sewa	18.3	11.7	8.2	6.8	14.5
Bebas sewa/Dinas	10.1	7.8	7.1	5.8	8.8
Lainnya	0.8	0.5	0.5	0.4	0.6
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

Rumah atau tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Memiliki rumah sendiri merupakan dambaan setiap rumah tangga. Namun, memiliki rumah sendiri bukan berarti tidak memiliki masalah kepemilikan rumah jika lahan tempat mendirikan rumah bukanlah milik sendiri seperti tanah milik orang lain atau tanah negara. Dari data BDT, sebanyak 1.271 rumah tangga yang memiliki rumah sendiri namun didirikan diatas lahan milik orang lain, sementara yang mendirikan rumah di atas tamah milik Negara sebanyak 212 rumah tangga.

Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah bukan di lahan milik sendiri pada kelompok rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah (desil 1) lebih banyak dibandingkan dengan kelompok rumah tangga di atasnya. Hal ini menunjukkan masalah kepemilikan lahan tempat tinggal pada rumah tangga kelompok termiskin lebih besar dari pada kelompok rumah tangga yang lebih sejahtera. Jumlah rumah tangga yang memiliki rumah milik sendiri menurut kepemilikan lahan dapat dilihat pada Tabel 2.9.

Tabel 2.9 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok yang Memiliki Rumah Sendiri Menurut Kepemilikan Lahan Tempat Tinggal dan Status Kesejahteraan

Kepemilikan Rumah	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Milik sendiri	25,796	21,016	5,867	2,178	54,857 1,271
Milik orang lain	611	489	125	46	212
Tanah Negara	110	85	14	3	112
Lain nya	70	33	4	5	

Rumah yang baik harus memenuhi syarat kelayakan sebagai tempat tinggal. Beberapa variabel yang sering digunakan untuk menilai kelayakan sebuah tempat tinggal adalah lantai, dinding dan atap. Semakin bagus kualitas dari lantai, dinding dan atap, mencerminkan kondisi sosial ekonomi yang tinggi. Dari rumah tangga BDT Kota Depok sebanyak 703 rumah tangga tinggal di rumah yang berlantai tanah dan sebanyak 143 rumah tangga tinggal di rumah yang berlantai bambu atau papan berkualitas rendah. Pada kelompok rumah tangga desil 1 rumah tangga yang tinggal di rumah yang berlantai tanah atau bambu lebih banyak dibandingkan dengan kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi. Untuk melihat jumlah rumah tangga menurut jenis lantai dapat dilihat pada Tabel 2.10.

Tabel 2.10 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Jenis Lantai dan Status Kesejahteraan

Jenis Lantai	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bukan Tanah/Bambu	36,886	26,864	7,121	2,560	73,431
Bambu/papan kualitas rendah	104	34	3	2	143
Tanah	562	122	16	3	703

Pada umumnya jenis dinding yang digunakan rumah tangga BDT di Kota Depok adalah tembok, namun masih ada rumah tangga yang tinggal di rumah dengan dinding kayu atau bamboo Jumlah rumah tangga yang tinggal di rumah berdinding kayu sebanyak 480 rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang tinggal di rumah berdinding bambu sebanyak 305 rumah tangga (Tabel 2.10). Rumah tangga yang menggunakan jenis dinding kayu atau bambu paling banyak pada berada pada kelompok termiskin (Desil 1).

Tabel 2.11 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Jenis Dinding dan Status Kesejahteraan

Jenis Dinding	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tembok	35,643	26,252	7,030	2,532	71,457
Plesteran anyaman bambu/ kawat	1,231	571	88	30	1,920
Kayu/batang kayu	340	121	17	2	480
Bambu/Anyaman bambu	246	55	4	0	305
Lainnya	92	21	1	1	115

Salah satu kriteria rumah tidak layak huni adalah rumah dengan jenis atap dari daun, jerami atau lainnya. Berdasarkan kriteria tersebut hamper seluruh rumah tangga BDT masuk kategori layak untuk jenis atap, hanya 32 rumah tangga yang menggunakan jenis atap tidak layak. Tabel 3.6 menyajikan jumlah rumah tangga menurut jenis atap yang digunakan.

Tabel 2.12 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Jenis Atap dan Status Kesejahteraan

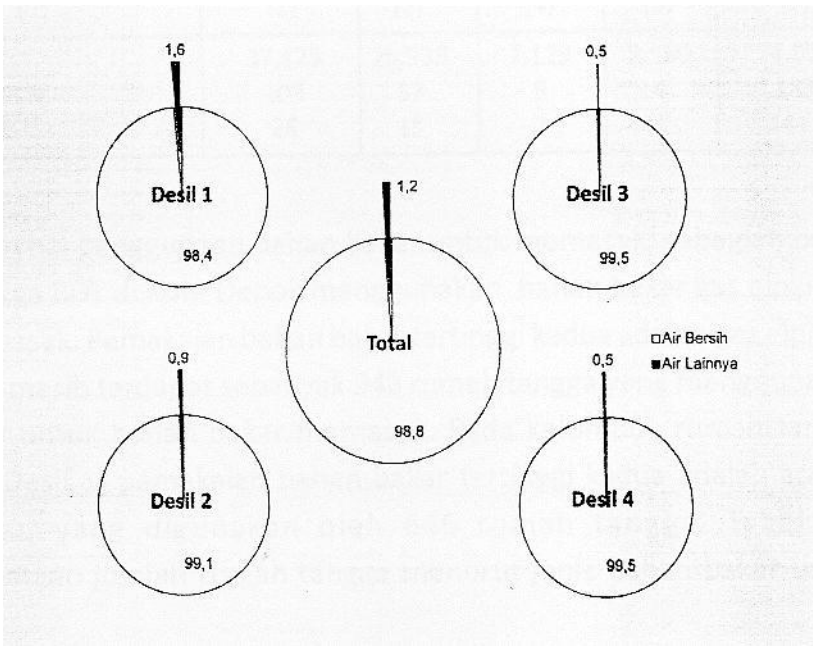
Jenis Atap	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Beton/genteng beton	154	281	162	71	668
Genteng keramik	154	183	66	27	430
Genteng metal	133	176	62	34	405
Genteng tanah liat	15,815	11,121	2,951	1,019	30,906
Asbes	20,743	15,024	3,855	1,396	41,018
Seng	514	229	44	17	804
Sirap	6	4	-	-	10
Bambu	3	1 .	-	-	4
Jerami/ijuk/daun	7	1	-	-	8
Lainnya	23	-	-	1	24

2. 9. 2. Sumber Air Minum

Air bersih merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dalam kehidupan sehari-hari.Kualitas sumber air minum yang digunakan oleh rumah tangga mempengaruhi kesehatan anggota rumah tangga.Sumber air minum disini terdiri dari air bersih dan air lainnya.Air bersih adalah air kemasan bermerek, air isi ulang, air ledeng, mata air dan sumurterlindung. Sedangkan air lainnya adalah airyang bersumberdari mata air dan sumur tak terlindung, air sungai, air hujan dan Jain-lain.

Sebagian besar rumah tangga BDT di Kota Depok menggunakan air bersih sebagai sumber air minum. Hanya sebagian kecil yang menggunakan air lainnya sebagai sumber air minum, Gambar3.1 memperlihatkan,sebesar 1,6 persen rumah tangga di kelompok desil 1 yang menggunakan air lainnya sebagai sumber air untuk minum, sementara pada kelompok desil 3 dan 4 hanya sebesar 0,5 persen rumah tangga.

Gambar 2.1 Persentase Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Sumber Air untuk Minum



2. 9. 3. Sumber Penerangan Utama dan Bahan Bakar Memasak

Setiap rumah tangga membutuhkan sumber penerangan. Sumber penerangan bisa berasal dari energi listrik atau lainnya seperti petromak atau pelita. Selain sebagai sumber penerangan, listrik juga menjadi sumber energi dalam setiap kegiatan di rumah tangga seperti untuk peralatan memasak, mencuci, setrika atau lainnya.

Listrik sudah menjadi sumber penerangan utama bagi hampir seluruh rumah tangga di Kota Depok. Rumah tangga yang tercatat dalam BDT Kota Depok hampir seluruhnya menggunakan listrik sebagai sumber penerangan utama, namun tercatat ada 44 rumah tangga yang tidak menggunakan listrik sebagai sumber penerangan. Jumlah rumah tangga BDT menurut sumber penerangan utama dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Sumber Penerangan Utama dan Status Kesejahteraan

Sumber Penerangan Utama	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Listrik PLN	37,423	26,938	7,129	2,560	74,050
Listrik non PLN	103	67	9	4	183
Bukan listrik	26	15	2	1	44

Dalam hal penggunaan bahan bakar untuk memasak, sebagian besar rumah tangga BDT di Kota Depok menggunakan bahan bakar gas elpiji 3kg untuk memasak. Pemakaian bahan bakar tertinggi kedua adalah gas elpiji >3 kg. Namun masih terdapat sebanyak 948 rumah tangga yang menggunakan kayu bakar untuk bahan bakar memasak. Pada kelompok rumah tangga termiskin (Desil 1) pemakaian bahan bakar tertinggi kedua adalah arang/ kayu bakar, yang digunakan oleh 646 rumah tangga. Tabel 2.14 memperlihatkan jumlah rumah tangga menurut jenis bahan bakar untuk memasak.

Tabel 2.14 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Jenis Bahan Bakar untuk Memasak dan Status Kesejahteraan

Jenis Bahan Bakar untuk Memasak	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Listrik	367	321	79	36	803
Gas > 3 kg	579	529	200	83	1,391
Gas 3 kg	35,310	25,043	6,545	2,355	69,253
Gaskota/biogas	296	367	118	49	830
Minyak tanah	163	123	30	5	321
Briket	14	5	2	1	22
Arang/Kayu bakar	646	255	36	11	948
Tidak memasak di rumah	177	377	130	25	709

2. 9. 4. Fasilitas Buang Air Besar

Memiliki sanitasi yang baik sangat penting bagi setiap rumah tangga, salah satunya adalah keberadaan fasilitas buang air besar. Tabel 2.15 memperlihatkan sebanyak 637 rumah tangga BDT tidak ada fasilitas jamban. Dari Tabel 3.9 terlihat bahwa pada rumah tangga pada kelompok kesejahteraan terendah (Desil 1) yang tidak ada fasilitas jamban sebanyak 555 rumah tangga.

Tabel 2.15 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Penggunaan Fasilitas Buang Air Besar dan Status Kesejahteraan

Fasilitas Jamban	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sendiri	34,115	25,520	6,833	2,495	68,963
Bersama	2,675	1,323	278	68	4,344
Umum	207	102	22	2	333
Tidak ada	555	75	7	-	637

Kesehatan lingkungan di sekitar tempat tinggal salah satunya sangat dipengaruhi oleh fasilitas pembuangan akhir dari kotoran. Fasilitas pembuangan akhir tinja yang tidak baik akan memperburuk kesehatan lingkungan. Penggunaan tangki/SPAL sebagai tempat pembuangan akhir tinja merupakan salah satu cara yang terbaik. Tabel 2.16 memperlihatkan sebagian besar rumah tangga BDT menggunakan tangki sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Namun masih banyak rumah tangga yang memanfaatkan kolam atau sungai sebagai pembuangan akhir tinja terutama pada kelompok Desil 1 (3870 rumah tangga). Hal ini menunjukkan kesadaran akan sanitasi yang baik dan kesehatan lingkungan pada kelompok Desil 1 masih sangat rendah.

Tabel 2.16 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Tempat Pembuangan Akhir Tinja dan Status Kesejahteraan

Pembuangan akhir tinja	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tangki	30,416	23,163	6,003	2,196	61,778
SPAL	1,290	936	244	75	2,545
Lubang tanah	1,842	2,064	831	273	5,010
Kolam/sawah/sungai	3,870	825	60	20	4,775
Pantai/kebun	22	6	-	-	28
Lainnya	112	26	2	1	141

2. 9. 5. Kepemilikan Aset

Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat dari asset atau barang yang dimiliki. Semakin besar asset yang dimiliki tentunya semakin tinggi pula tingkat kesejahteraannya. Pada data BDT ada beberapa informasi mengenai aset yang dimiliki oleh rumah tangga.

Jenis aset yang paling banyak dimiliki oleh rumah tangga BDT dari semua kelompok Desil adalah televisi. Persentase rumah tangga yang memiliki televisi pada kelompok desil 1 dan 2 sebesar 91 persen, semenara pada kelompok desil 3 dan 4 sebesar 92;5 dan 95,2 persen. Selain televisi, ternyata sepeda motor dan lemari es juga banyak dimiliki kelompok rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Pada kelompok Desil 1 persentase rumah tangga yang memilki sepeda motor sebesar 53,7 persen, sementara pada kelompok Desil 4 sebesar 66,1 persen.

Tabel 2.17 Persentase Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Jenis Aset yang Dimiliki dan Status Kesejahteraan

Aset Rumah Tangga	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tabung gas 5,5 kg atau lebih	1.7	2.4	4.3	5.8	2.4
Lemari es/kulkas	49.8	70.9	81.7	90.8	61.9
AC	0.3	0.7	1.4	2.7	0.6
pemanas Air	1.1	1.5	1.5	2.1	1.3
Telepon rumah	0.1	0.4	1.6	2.9	0.4
Televisi	91.0	91.0	92.5	95.2	91.3
Emas/perhiasan & tabungan	2.4	4.3	5.7	6.7	3.6
Komputer/laptop	1.7	4.0	6.7	9.2	3.3
Sepeda	9.9	9.6	8.7	9.0	9.7
Sepeda Motor	53.7	62.4	64.4	66.1	58.3
Mobil	0.1	0.6	1.4	2.3	0.5

Tabel 3.12 memperlihatkan persentase rumah tangga BDT yang memiliki aset berupa lahan atau rumah selain yang di tempati atau berlokasi di tempat lain. Persentase rumah tangga yang memiliki lahan di tempat lain cukup tinggi, pada kelompok Desil 1 sebesar 73,5 persen, sementara pada kelompok rumah tangga Desil 4 sebesar 87,9 persen. Sebaliknya persentase rumah tangga yang memiliki rumah di tempat lain sangat kecil.

Tabel 2.18 Persentase Rumah Tangga BDT Kota Depok yang Memiliki Lahan atau Rumah di Tempat Lain Menurut dan Status Kesejahteraan

Kepemilikan lahan dan Rumah di tempat lain	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lahan	73.5	81.4	85.3	87.9	78.0
Rumah di tempat lain	1.0	1.6	2.2	2.1	1.4

2. 9. 6. Kepesertaan Program

Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk mengentaskan kemiskinan melalui beberapa program seperti Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program lainnya. Program KIS merupakan program dengan persentase kepesertaan tertinggi pada setiap kelompok rumah tangga. Pada kelompok Desil 1 persentase rumah tangga yang menerima program KIS sebesar 71,6 persen. Untuk melihat persentase rumah tangga yang menerima program pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan dapat dilihat pada Tabel 2.19.

Tabel 2.19 juga memperlihatkan bahwa Program PKH yang diperuntukan bagi rumah tangga sangat miskin, ternyata juga diterima oleh rumah tangga pada kelompok Desil 3 dan Desil 4. Namun persentase rumah tangga penerima PKH pada rumah tangga kelompok Desil 1 masih lebih besar dibandingkan dengan rumah tangga dari kelompok lainnya. Hal ini kemungkinan disebabkan rumah tangga penerima program PKH telah mengalami peningkatan kesejahteraan.

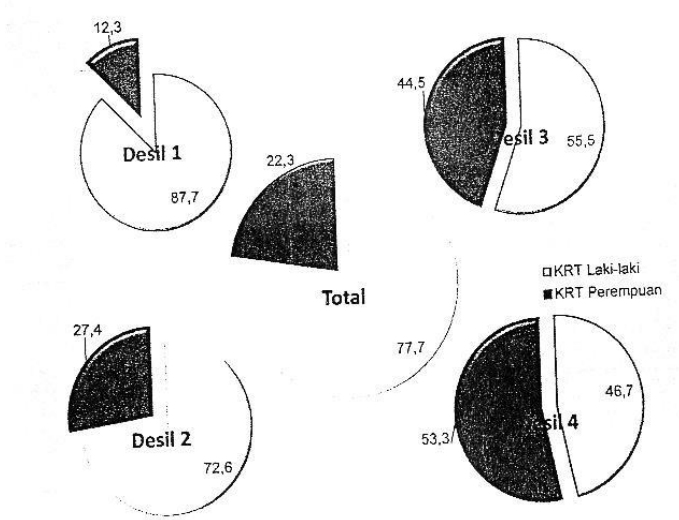
Tabel 2.19 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Kepesertaan Program Perlindungan Sosiali dan Status Kesejahteraan

Jenis Program	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KKS	40,0	26,5	18,4	15,8	32,2
KIP/BSM	5,9	2,8	1,5	0,9	4,2
KIS	71,6	63,1	55,1	49,9	66,2
BPJS mandiri	4,0	8,0	12,6	15,9	6,7
BPJS naker	2,2	4,0	5,1	6,4	3,3
Asuransi lain	3,2	4,1	5,1	6,1	3,8
PKH	3,9	1,2	0,6	0,7	2,5
Raskin	59,3	51,2	44,7	39,4	54,2
KUR	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4

2. 10. Karakteristik Kepala Rumah Tangga berdasarkan Jenis kelamin

Kepala rumah tangga (KRT) adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga, atau orang yang dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT. Perempuan sebagai KRT memiliki beban yang berat karena harus berperan ganda, selain berperan sesuai kodratnya sebagai perempuan, juga harus bertanggung jawab terhadap kebutuhan anggota rumah tangganya. Berdasarkan jenis kelamin terdapat 22,3 persen rumah tangga BDT dengan perempuan sebagai kepala rumah tangga. Dari Gambar 3.2 dapat dilihat, persentase rumah tangga dengan kepala rumah tangga perempuan pada kelompok rumah tangga desil 1 sebesar 12,3 persen. Persentase rumah tangga BDT dengan kepala rumah tangga perempuan berada pada kelompok rumah tangga Desil 4 sebesar 53,3 persen.

Gambar 2.2 Persentase Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Jenis Kelamin Kepala Rumah Tangga



Tingkat pendidikan mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap kebutuhan anggota rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga tentunya mempengaruhi kesejahteraan rumah tangganya. Berdasarkan ijazah yang dimiliki, sebagian besar kepala rumah tangga BDT berpendidikan rendah. Persentase kepala rumah tangga yang tidak punya ijazah sebesar 24,0 persen dan yang tamat SD/ sederajat sebesar 32,5 persen. Tabel 2.20 menyajikan secara rinci tingkat pendidikan Kepala rumahtangga menurut status kesejahteraan.

**Tabel 2.20 Jumlah Rumah Tangga BDT Kota Depok Menurut Ijazah
Kepala Rumah Tangga dan Status Kesejahteraan**

Ijazah yang dimiliki	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak punya	22.2	25.9	26.2	24.3	24.0
SD/ sederajat	36.1	30.2	26.1	23.2	32.5
SMP/ sederajat	25.3	16.4	12.4	12.2	20.4
SMA/ sederajat	16.2	26.6	33.4	37.1	22.4
D1/D2/D3	0.1	0.5	1.0	1.9	0.4
DVS1/S2/S3	0.1	0.4	0.9	1.3	0.3
Total	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

2. 11. Karakteristik Anggota Rumah Tangga

2. 11. 1. Kepemilikan Akta Kelahiran

Salah satu hak anak adalah memperoleh nama dan identitas yang di akui oleh negara. Akta Kelahiran adalah bentuk pengakuan terhadap hak sipil dan hak politik sebagai warga Negara. Dengan memiliki akta kelahiran, anak dapat terbantu untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga Negara, seperti mendapat bantuan pendidikan, jaminan kesehatan dan lain-lainnya.

Berdasarkan data BDT 2015, penduduk usia anak (0-17 tahun) di Kota Depok yang belum memiliki Akta Kelahiran sebesar 28,8 persen. Persentase terbesar anak yang belum memiliki akta kelahiran berada di kecamatan Sawangan sebesar 50,6 persen, berikutnya kecamatan Bojongsari sebesar 44,5 persen. Di seluruh kecamatan di Kota Depok, persentase tertinggi anak yang belum memiliki akta kelahiran berada pada kelompok rumah tangga dengan status kesejahteraan terendah. Kenyataan ini menunjukkan kesadaran rumah tangga miskin untuk mengurus akta kelahiran anak-anaknya sebagai salah satu pemenuhan hak anak masih rendah. Gambaran lebih lengkap mengenai persentase anak yang belum memiliki akta kelahiran menurut kecamatan dan status kesejahteraan rumah tangga dapat dilihat pada Tabel 2.21.

Tabel 2.21 Persentase penduduk Usia anak (<18 tahun) Tidak Memiliki Akta Kelahiran Menurut Kecamatan dan Status Kesejahteraan

Kecamatan	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SAWANGAN	52.6	42.1	27.2	50.0	50.6
BOJONGSARI	45.1	33.1	24.4	20.0	42.5
PANCORAN MAS	28.8	20.1	13.0	12.9	25.8
CIPAYUNG	45.3	34.6	19.2	34.5	42.0
SUKMAJAYA	27.1	15.4	11.7	5.3	22.9
CILODONG	25.8	17.0	14.4	3.6	23.6
CIMANGGIS	21.1	13.7	9.9	15.5	17.9
TAPOS	24.5	16.7	14.1	7.8	22.2
BEJI	13.3	8.7	8.2	7.3	11.5
LIMO	32.0	22.1	16.7	17.4	28.9
CINERE	28.0	23.0	13.2	29.5	25.2
KOTA DEPOK	32.5	20.9	14.0	15.4	28.8
Jumlah anak 0-17 tahun	59.093	20.652	3.073	752	83.570

2. 11. 2. Jenis Disabilitas dan Penyakit Kronis

Basis Data Terpadu juga memuat informasi mengenai penduduk yang mengalami disabilitas yang merupakan anggota rumah tangga dari rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan 40 persen terbawah. Jumlah penduduk yang mengalami disabilitas dari rumah tangga BDT sebanyak 3033 orang. Jenis disabilitas yang paling banyak disandang adalah tuna daksa/cacat tubuh, yang disandang oleh 656 orang. Table 2.22 memperlihatkan jumlah penduduk yang mengalami disabilitas menurut jenis disabilitas.

Tabel 2.22 Jumlah Penduduk BDT Kota Depok Menurut Jenis Disabilitas dan Status Kesejahteraan

Jenis disabilitas	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tuna daksa/cacat tubuh	360	220	59	17	656
Tuna netra	201	137	25	8	371
Tuna rungu	102	65	18	6	191
Tuna wicara	143	55	11	4	213
Tuna rungu & wicara	88	49	6	2	145
Tuna netra & cacat tubuh	28	24	1	-	53
Tuna netra, rungu & wicara	14	10	2	-	26
Tuna rungu, wicara & cacat tubuh	43	20	6	1	70
Tuna rungu, wicara, netra & cacat tubuh	34	18	4	2	58
Cacat mental/retardasi	369	198	30	15	612
mantan penderita gangguan jiwa	167	83	20	8	278
Cacat fisik dan mental	210	118	28	4	360
Total Disabilitas	1,759	997	210	67	3,033

Informasi mengenai penyakit kronfs yang diderita oleh penduduk juga dimuat dalam Basis data terpadu. Berdasarkan data BDT jumlah penderita penyakit kronis sebanyak 20.059 orang dengan bermacam jenis penyakit kronis.Pada kelompok rumah tangga Desil 1, jumlah penduduk yang menderita penyakit kronis sebanyak 9.829 dan pada kelompok Desil 2 sebanyak 7.527 orang. Jenis penyakit kronis yang paling banyak diderita oleh penduduk adalah hipertensi dan rematik. Untuk melihat jumlah penduduk menurut jenis penyakit kronis yang diderita dapat dilihat pada Tabel 2.23.

Tabel 2.23 Jumlah Penduduk BDT Kota Depok Menurut Jenis Penyakit Kronis dan Status Kesejahteraan

Jenis Penyakit Kronis	Desil 1	Desil 2	Desil 3	Desil 4	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hipertensi	2.925	2.359	628	215	6.127
Rematik	1.896	1.494	376	132	3.898
Asma	949	650	163	48	1.810
Masalah jantung	438	359	105	38	940
Diabetes	642	643	207	97	1.589
TBC	367	207	44	16	634
Stroke	545	512	144	47	1.248
Kanker	184	121	39	12	356
Lainnya	1.883	1.182	291	101	3.457
Jumlah penderita	9,829	7,527	1,997	706	20,059

BAB III

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KOTA DEPOK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, baik laki-laki maupun perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Masyarakat miskin diakui mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Masyarakat miskin secara umum ditandai dengan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan dalam hal memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs*) seperti pangan dan gizi, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Di samping itu masyarakat miskin juga ditandai dengan ketidakmampuan dalam melakukan kegiatan usaha produktif serta ketidakmampuan dalam menjangkau/mengakses sumberdaya sosial dan ekonomi. Kemiskinan dapat menghambat pencapaian demokrasi, persatuan dan keadilan, sehingga penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu kebijakan utama yang diperlukan untuk memperkuat landasan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Salah satu permasalahan penanggulangan kemiskinan selama ini adalah database kemiskinan yang belum akurat maupun variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat kemiskinan seseorang (kepala keluarga) serta keterpaduan program antar PD dan stakeholder. Untuk itu penyediaan database yang akurat perlu dilakukan sehingga ukuran kemiskinan telah mendekati realita yang ada dilapangan dan keterpaduan program perlu disinergikan.

Secara nasional, penanggulangan kemiskinan menghadapi *triple track problem*, yaitu kemiskinan yang meskipun terus menurun namun penurunannya melambat. Kedua, kerentanan kemiskinan, yaitu banyaknya penduduk miskin di sekitar Garis Kemiskinan (GK) yang mengakibatkan mudahnya kelompok yang berada di atas GK jatuh ke bawah GK. Ketiga, kesenjangan baik kesenjangan antar wilayah/provinsi (wilayah timur dan wilayah barat) maupun kesenjangan pendapatan/konsumsi antar penduduk secara keseluruhan dan antar penduduk miskin (indeks keparahan kemiskinan). Dengan tantangan tersebut, penanggulangan kemiskinan perlu ditingkatkan akselerasinya.

Menurut Perpres Nomor 15 Tahun 2010, arah kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Perpres tersebut juga memuat strategi dan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara nasional. Secara nasional strategi percepatan penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan:

1. Mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin.
2. Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin.
3. Mengembangkan dan menjamin keberlanjutan Usaha Mikro dan Kecil.
4. Mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Sementara itu, Kota Depok juga mencantumkan komitmennya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam visi misinya. Adapun visi pembangunan Kota Depok sampai dengan Tahun 2021 adalah: “TERWUJUDNYA KOTA DEPOK YANG UNGGUL, NYAMAN DAN RELIGIUS”. Sebagai penjabaran visi Pemerintah Kota Depok diatas disusunlah misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi dan Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang ingin dicapai dalam pembangunan Kota Depok 2016–2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional dan transparan.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang kreatif dan berdaya saing.
3. Mengembangkan ekonomi yang mandiri, kokoh dan berkeadilan.
4. Membangun infrastruktur dan ruang publik yang merata, berwawasan lingkungan dan ramah keluarga.
5. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai agama dan menjaga kerukunan antar umat beragama serta meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara.

Dari misi tersebut kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang selanjutnya diuraikan menjadi program dan kegiatan oleh masing-masing perangkat daerah terkait.

Adapun strategi untuk Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kota Depok untuk tahun 2019-2023 adalah dengan melakukan penggunaan basis data terpadu (BDT) dan atau data terpadu Fakir Miskin yang dikeluarkan oleh tim nasional Percepatan penanggulangan kemiskinan (TNP2K) sebagai acuan bagi seluruh perangkat daerah dalam menentukan target penerima program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sehingga diharapkan angka kemiskinan di kota depok semakin menurun. Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kota Depok sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran dan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Kota Depok

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Dinas Pelaksana
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Menuju Smart Healthy City	Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Layanan Kesehatan	Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) baik dasar maupun rujukan	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya status gizi Masyarakat	Prevalensi gizi buruk	Peningkatan Kewaspadaan pangan dan Gizi	
		Meningkatnya Perilaku hidup Bersih Sehat dan tatanan Kota	Meningkatkan upaya promosi PHBS serta Pengembangan Kota Sehat	Peningkatan Kesehatan Lingkungan	
				Peningkatan Promosi Kesehatan	
2	Meningkatnya perekonomian dan perluasan Pengembangan Ekonomi Wilayah Daerah Berbasis Pemanfaatan Potensi Lokal	Terpenuhinya kebutuhan pangan kota	Jumlah KWT; Jumlah orang yang dilatih	1. Meningkatkan Ketahanan pangan dan holtikultura, 2. Mengembangkan Produksi hasil peternakan	DKP3

3	Mewujudkan Kawasan Perumahan dan Permukiman yang Nyaman	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Prosentase berkurangnya luas kawasan kumuh sampai dengan : 0,31%	Menyediakan Sarana dan Prasarana Permukiman yang Berkualitas	Dinas Perumahan dan Permukiman
			Prosentase rumah tangga yang mempunyai sanitasi baik: 98,7%		
			Jumlah backlog kepemilikan rumah: 121.796 unit		
			Jumlah backlog kepemilikan rumah: 121.796 unit		
			Persentase rumah layak huni : 99,50%		
4	Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur keairan	Meningkatnya jaringan dan keberlanjutan ketersediaan air	prosentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman	Meningkatkan layanan penyediaan air bersih	

5	Membangun ketahanan keluarga dan kesejahteraan sosial sebagai basis peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Meningkatnya kualitas kehidupan keluarga dan kesejahteraan sosial masyarakat	Pemberdayaan perempuan di lokasi P2WKSS	Meningkatkan pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan sosial bagi PMKS serta pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan PMKS	Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan keluarga
			Perempuan Kepala keluarga	Peningkatan kualitas keluarga miskin dan rentan	
			Pemberdayaan Kepala Keluarga Rawan	Penguatan peran kepala keluarga dalam pembangunan ketahanan keluarga	
6	Terciptanya koperasi dan usaha mikro yang mandiri dan berdaya saing	meningkatnya pertumbuhan dan daya saing usaha mikro	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	Menciptakan industri kecil, menengah, usaha mikro mandiri dan wirausaha baru	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
7	Terwujudnya kemandirian PMKS	Meningkatnya pemberdayaan PMKS	Prosentase keluarga miskin yang meningkat kualitas hidupnya	Perlindungan Jaminan Sosial	
				Peningkatan Rehabilitasi Sosial	
				Pemberdayaan Sosial	

8	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang Profesional	Meningkatnya Tertib Administrasi Kependudukan	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk, Cakupan penerbitan Kartu keluarga, Cakupan penerbitan KIA, Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran	Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan pengendalian stabilitas kebutuhan pokok masyarakat	Persentase jumlah IKM mandiri, Manajemen Keuangan, Desain Kemasan, Pemasaran Lewat IT	Meningkatkan kualitas Industri Kecil Menengah yang mandiri dan wirausaha baru	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
10	Meningkatkan Kualitas Pelayanan kepada Masyarakat	Meningkatnya Kualitas Kesehatan dan Kesejahteraan masyarakat	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	Mempercepat pemerataan infrastruktur wilayah	Kecamatan Beji
11	Meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman masyarakat	Meningkatkan ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat	Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran	melakukan pemetaan atas RTLH di masyarakat	Kecamatan Cimanggis
12	Membangun Infrastruktur yang merata	Berkurangnya Jumlah RTLH	Persentase RTLH	Mempercepat pemerataan infrastruktur wilayah	Kecamatan Limo

13	Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan Permukiman	Rasio rumah layak huni	Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Kecamatan Pancoran Mas
14	Meningkatkan kawasan perumahan dan pemukiman yang lebih baik dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang bersih	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang berpenghasilan rendah dan pengelolaan lingkungan yang bersih dengan melibatkan masyarakat	Jumlah Persentase Rumah Layak Huni	Mempercepat pemerataan infrastruktur wilayah	Kecamatan Sawangan
15	Meningkatkan Kualitas pelayanan masyarakat	Meningkatnya kualitas/mutu pelayanan publik	Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran	Mempercepat pemerataan infrastruktur wilayah	Kecamatan Sukmajaya
16	Memberikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya perlu perbaikan sehingga layak untuk huni	Meningkatnya ketersediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang terintegrasi dengan infrastruktur sosial, ekonomi dan keberagaman	Persentase rumah tidak layak huni	Meningkatkan pelayanan Air Bersih, Pemakaman serta Ketersediaan rumah bagi masyarakat	Kecamatan Tapos

17	Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) kualitas rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Kecamatan Cinere
18	Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana perumahan dan permukiman	Persentase rumah tidak layak huni	Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah tidak layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Kecamatan Cipayung
19	Mewujudkan ruang kota yang nyaman dan ramah keluarga	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana Perumahan dan permukiman	rasio Rumah tidak layak huni	Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Kecamatan Bojongsari
20	Meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan permukiman masyarakat	Meningkatnya ketersediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat	Jumlah RTLH yang diperbaiki dan tepat sasaran	Melakukan pemetaan atas RTLH di masyarakat	Kecamatan Cilodong

21	Mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan	Meningkatnya sinergitas dan efektifitas program penanggulangan kemiskinan	Tingkat keselarasan kegiatan Perangkat Daerah yang terkait dengan percepatan penanggulangan kemiskinan	Peningkatan sinergitas penyelenggaraan pemerintahan	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
21	Meningkatkan Kualitas dan Akses Layanan Pendidikan	Meningkatnya Kualitas, kuantitas dan akses layanan pendidikan Formal	Meningkatnya APK PAUD, SD/MI, dan SMP/MTs	Pencapaian wajar pendidikan dasar (Dikdas)	Dinas Pendidikan
		Meningkatnya Kualitas, kuantitas dan akses layanan pendidikan Masyarakat	Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia dewasa di atas 15 tahun	Meningkatkan angka melek huruf dan penuntasan Buta Aksara Latin	
22	Mengembangkan Kemandirian Ekonomi Lokal yang Kokoh dan Berkeadilan	Meningkatnya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat	Indeks Gini Ratio dan pendapatan perkapita	Meningkatkan kompetensi dan produktifitas usia kerja yang miskin	Dinas tenaga Kerja

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN RENCANA AKSI DAERAH (RAD) PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KOTA DEPOK

Dari Tujuan, Sasaran, Indikator sasaran dan strategi kemudian dijabarkan dalam Program dan Kegiatan sebagai Rencana aksi daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kota Depok Tahun 2019-2023 yang disajikan dalam tabel berikut:

No.	Rencana Aksi		Indikator Kinerja	Tahun Dasar	Target Pencapaian					Instansi Pelaksanan
	Program	Kegiatan			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Pancoran Mas	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	86 Orang	86 Orang	86 Orang	86 Orang	86 Orang	86 Orang	Dinkes
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	
		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sukmajaya	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	110 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	39 orang	

		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cimanggis	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	117 Orang	117 Orang	117 Orang	117 Orang	117 Orang	117 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	
		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cinere	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	24 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	
		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Bojongsari	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	52 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	52 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	

		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Beji	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	
		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Tapos	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	124 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	124 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	66 Orang	
		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Sawangan	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	68 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	31 Orang	

		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cipayung	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	51 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	30 Orang	
		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Cilodong	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	54 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	
		Pelayanan Kesehatan Dasar, 24 jam dan Rawat Inap Puskesmas Kecamatan Limo	Jumlah Balita Kurang Gizi yang Mendapatkan PMT-P	23 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	
			Jumlah Ibu Hamil Gakin/KEK yang mendapatkan PMT-P	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	15 Orang	

		Penyelenggaraan Pembiayaan Kesehatan Masyarakat Miskin	Jumlah Peserta Non Kuaota PBI yang Mendapatkan Pelayanan kesehatan	250 orang	421 Orang	421 Orang	421 Orang	421 Orang	421 Orang	
			Jumlah Rumah Sakit yang bekerjasama dengan Kota Depok (di dalam dan di Luar Wilayah)	24 RS	29 RS	30 RS	32 RS	32 RS	32 RS	
		Pembiayaan Kesehatan PBI APBD II	Jumlah Jiwa dibayarkan premi KiS PBI APBD	213.067 Jiwa	234.373 Jiwa	257.811 jiwa	283.592 jiwa	311.951 jiwa	343.146 jiwa	
2	Peningkatan Kewaspadaan pangan dan Gizi	Penanganan Permasalahan Gizi Masyarakat	Jumlah Pos gizi yang dibina	10 pos Gizi	10 pos Gizi	10 pos Gizi	10 pos Gizi	10 pos Gizi	10 pos Gizi	Dinas Kesehatan
		Penyehatan Lingkungan Permukiman	Pembinaan lokasi P2WKSS yang dilakukan pembinaan kesehatan lingkungan	1 lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	2 Lokasi	

		Peningkatan Kualitas PHBS	Jumlah lokasi P2WKSS yang dilakukan pembinaan PHBS	2 tatanan	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	10 Lokasi	
3	Penanggulangan kemiskinan terpadu	Pemberdayaan petani marginal dan P2WKSS	Jumlah Kelompok yang dilatih budidaya dan pengolahan; jumlah jenis bantuan sarana dan prasarana	4 Kelompok, 2 lokasi, 4 paket, 2 lokasi	120	120	120	120	120	DKP3
4	Penataan Kawasan Permukiman	Penataan Kawasan Kumuh	Jumlah titik kawasan kumuh yang ditata	18 Titik	22 Titik	25 Titik	28 Titik	31 Titik	34 Titik	Disrumkim
5	Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Skala Rumah Tangga dan Komunal	Pembangunan IPAL Komunal	Jumlah IPAL Komunal/Kawasan terbangun	31 Unit	35 Unit	39 Unit	43 Unit	45 Unit	49 Unit	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Pengembangan dan Peningkatan Kualitas IPAL Komunal	Jumlah IPAL terpelihara	20 IPAL	22 IPAL	26 IPAL	30 IPAL	34 IPAL	38 IPAL	
6	Jumlah KK yang belum terakses septictank : 5614 KK	Pembangunan Septictank	Jumlah KK yang belum terlayani septitank	8914 KK	7914 KK	6914 KK	5914 KK	4914 KK	3914 KK	Dinas Perumahan dan Permukiman

7	Jumlah KSM terbina : 32 KSM	Pembinaan KSM Pengelola IPAL Komunal berbasis masyarakat	Jumlah Kelompok Swadaya masyarakat	26 KSM	28 KSM	30 KSM	32 KSM	34 KSM	36 KSM	Dinas Perumahan dan Permukiman
8	Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Pengembangan perumahan bersusun dan tidak bersusun	Jumlah rumah susun terpelihara : 3 tower	3 Tower	3 Tower	3 Tower	4 Tower	4 Tower	4 Tower	Dinas Perumahan dan Permukiman
9	Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)	Penyusunan Mekanisme penyediaan rumah sejahtera untuk MBR	Jumlah dokumen yang tersusun	-	-	1 Dokumen	-	-	-	Dinas Perumahan dan Permukiman
10	Perbaikan rumah tidak layak huni	Monitoring dan evaluasi rumah tidak layak huni	Jumlah dokumen laporfan monev RTLH	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Perumahan dan Permukiman
		Replikasi PNPM	Jumlah swadaya Masyarakat	63 BKM	63 BKM	63 BKM	63 BKM	63 BKM	63 BKM	
11	Peningkatan pengelolaan dan layanan air bersih	Pengembangan jaringan distribusi air bersih	Pengembangan jaringan distribusi air bersih perpipaan	16500 SR	17500 SR	18500 SR	19500 SR	20500 SR	21500 SR	Dinas Perumahan dan Permukiman

		perpipaan	Pembangunan infrastruktur air bersih non perpipaan	3500 SR	4000 SR	4500 SR	5000 SR	5500 SR	6000 SR	
12	Penguatan peran perempuan dalam pembangunan ketahanan keluarga	Pelaksanaan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)	Jumlah KK Binaan di lokasi	100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	100 KK	DPAPMK
13	Peningkatan kualitas keluarga miskin dan rentan	Peningkatan keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) perempuan Kepala Keluarga (PEKKA)	Jumlah peserta pelatihan bagi PEKKA	60 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	90 orang	DPAPMK
14	Penguatan peran kepala keluarga dalam pembangunan ketahanan keluarga	Peningkatan keterampilan dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Kepala Keluarga	Jumlah peserta pelatihan bagi kepala keluarga	0	0	0	0	100 orang	100 orang	DPAPMK

15	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan	Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi Kemiskinan dan P2WKSS	Jumlah rumah tangga terbina	100 org (2 lokasi)	50	50	200	200	200	DKUM
16	Perlindungan Jaminan Sosial	Penyelenggaraan Program Keluarga Harapan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat Yang ditangani oleh Pendamping PKH	22282 kpm	22282 kpm	23396 kpm	24565 kpm	25793 kpm	27082 kpm	Dinas Sosial
		Pelayanan Santunan Kematian	Jumlah Fakir Miskin yang Menerima Santunan Kematian per tahun	3.150 Orang	3.244 Orang	3.341 Orang	3.441 Orang	3544 Orang	3.650 Orang	
		verifikasi dan validasi penerima program jaminan sosial	Jumlah Penerima Program Jaminan Sosial yang terverifikasi dan tervalidasi	77903 KK	77903 KK	77903 KK	77903 KK	77903 KK	77903 KK	
		Bantuan Pangan Non Tunai	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Rumah Singgah	36849 kpm	36849 kpm	38691 kpm	40625 kpm	42656 kpm	44780 kpm	
		Program Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Jumlah orang terlayani	-	6300 orang	6615 orang	6945 orang	7292 orang	7656 orang	

17	Peningkatan Rehabilitasi Sosial	pelayanan PMKS dalam panti/rumah singgah	Jumlah Sarana dan Prasarana dalam Pelayanan Rumah Singgah	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	Dinas Sosial
18	Pemberdayaan Sosial	pengadaan alat bantu penyandang cacat	Jenis Alat Bantu yang diberikan kepada Penyandang Cacat	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	3 Jenis	Dinas Sosial
		Bimbingan dan Konselor bagi PMKS	Jumlah Konselor	110 orang	120 orang	130 orang	140 orang	150 orang	160 orang	
19	Peningkatan layanan kependudukan dan catatan sipil	Pelayanan Terpadu sidang Isbat Nikah bagi Penduduk Kurang Mampu	Jumlah Sidang Isbat Nikah Secara Terpadu	120 Penetapan Sidang Isbat Nikah	120	120	120	120	120	DISDUKCAPIL
20	Peningkatan Kualitas Keluarga Miskin dan Rentan	Pelatihan Aneka Olahan Produk Lokal	Jumlah peserta	100	100	100	100	100	100	DISPERDAGIN
		Pelatihan Keterampilan Menjahit di Lokasi P2WKSS	Jumlah peserta	50	50	50	50	50	50	
21	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Pembangunan Rehabilitasi RTLH	Jumlah Unit	108	60	60	60	60	60	Kec. Beji
		Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH	40 unit	40	40	40	40	40	Kec. Cimanggis

		Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	109 unit	109 unit	109 unit	109 unit	109 unit	109 unit	Kec. Limo
		Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH yang diperbaiki	183 unit	183 unit	183 unit	183 unit	183 unit	183 unit	Kec. Panmas
		Rehabilitasi RTLH	Jumlah unit	133 unit	133 unit	133 unit	133 unit	133 unit	133 unit	Kec. Sawangan
		Rehabilitasi RTLH	Tersusunnya DED RTLH dan Terlaksananya Monev RTLH	255 RTLH	150	150	150	150	150	Kec. Sukmajaya
		Pembangunan RTLH	Jumlah RTLH	88 unit	88	180	195	200	205	Kec. Tapos
		Rehabilitasi RTLH	Jumlah penerima	34 orang	34 orang	34 orang	34 orang	34 orang	34 orang	Kec. Cinere
		Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH	95	120	120	120	120	120	Kec. Cipayung
		Rehabilitasi RTLH	Jumlah RTLH yang direhabilitasi	46 unit	75	85	95	105	115	Kec. Bojongsari
		Rehabilitasi RTLH	Jumlah Dokumenpendat aan dan ferivikasi, jumlah kegiatan Monitoring dan evaluasi	220	200	150	100	100	100	Kec. Cilodong

22	Peningkatan Sistem Pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Sinergitas Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)	Peningkatan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah Monev	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	4 kali	Bappeda
				Jumlah FGD/Rakor	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	3 kali	
				Jumlah Dokumen Laporan	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	2 kali	
23	Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan	Pembiayaan Peyelenggaraan Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	DISDIK
			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	0.001%	
			Angka melanjutkan dari jenjang SD/MI ke SMP/MTs	83.14%	85.43%	87.72%	90.01%	90.30%	90.30%	
		Pembiayaan Peyelenggaraan Pendidikan SD/MI dan SMP/Mts	Angka melanjutkan dari jenjang SMP/Mts ke SMA/MA	77.12%	80.83%	84.54%	88.25%	91.96%	91.96%	
			Angka Kelulusan SD/MI/Paket A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
24	Peningkatan Kesetaraan Pendidikan Masyarakat	Penyelenggaraan Kejar Paket A, B dan C di PKBM	Angka Kelulusan SMP/MTs/Paket B	99.16%	99.16%	99.37%	99.58%	99.79%	100%	
			Angka Kelulusan Paket C	98.10%	98.10%	98.15%	99.20%	98.25%	98.30%	

25	Peningkatkan perluasan kesempatan kerja	Pelatihan Kewirausahaan	Jumlah Peserta	40 orang	–	40 orang	45 orang	50 Orang	55 Orang	DISNAKER
		Padat Karya Perkotaan	Jumlah penyerapan tenaga kerja	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	50 orang	

BAB V

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan Kemiskinan Terpadu disusun sebagai acuan dalam melakukan upaya penanggulangan kemiskinan dalam jangka 5 (lima) tahun ke depan dan diharapkan mampu membawa perubahan bagi upaya penurunan tingkat kemiskinan di Kota Depok

Dalam Penyusunan Dokumen RAD ini dirasakan masih terdapat kelemahan, oleh sebab itu secara dinamis dapat dilakukan revisi sesuai perkembangan apabila terdapat perubahan kebijakan dari pemangku kebijakan yang lebih tinggi dan juga perubahan situasi kondisi lingkungan yang ada.

